



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Pertanian sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pertanian menetapkan visi Kementerian Pertanian 2015-2019 yaitu “terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”. Sasaran strategis dan target yang ditetapkan tahun 2018 dalam rangka mewujudkan visi tersebut antara lain: (1) Meningkatnya pendapatan keluarga petani dengan target PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian sebesar 26,9 Juta rupiah; (2) Meningkatnya ketahanan pangan nasional dengan target peringkat 69 pada Indeks Ketahanan Pangan; (3) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional dengan target pertumbuhan volume ekspor sebesar 8,97%, penurunan volume impor sebesar 5,02%, dan rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian sebesar 0,1%; (4) Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional dengan target rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional sebesar 5,9%; serta (5) Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional dengan target jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia sebesar 11 dan rasio kasus komoditas pertanian impor diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor sebesar 5%.

Setiap pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian dapat mencapai tujuan jika dilaksanakan sesuai peraturan serta menerapkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Hal itu dapat diwujudkan dengan menerapkan sistem pengendalian yang baik. Proses pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian didukung dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian pasal 786, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern yang terdiri dari kegiatan audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja dan keuangan Kementerian Pertanian.

Peran aktif Inspektorat Jenderal dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian telah dilakukan sesuai peraturan dan menerapkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pengelola program memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan Kementerian Pertanian. Berdasarkan hal itu, Inspektorat Jenderal dituntut untuk menjadi contoh oleh Eselon 1 lain di lingkungan Kementerian Pertanian serta terus meningkatkan kapasitas pengawasan intern. Pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal tahun 2018 disajikan dalam Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018 ini.

B. TUJUAN

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi yang memadai tentang keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2018 serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

C. RUANG LINGKUP

Laporan Tahun 2018 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mencakup hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang mengacu pada Tugas dan Fungsi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

D. VISI DAN MISI

Penyusunan Laporan Tahun 2018 berpedoman pada visi dan misi Inspektorat Jenderal dan Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Itjen 2015 – 2019, Visi Inspektorat Jenderal adalah ***“Menjadi Pengawas Intern Mitra Pro-aktif Pengelola Program Pertanian dalam rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”***.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
3. Meningkatkan kapasitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

BAB II

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

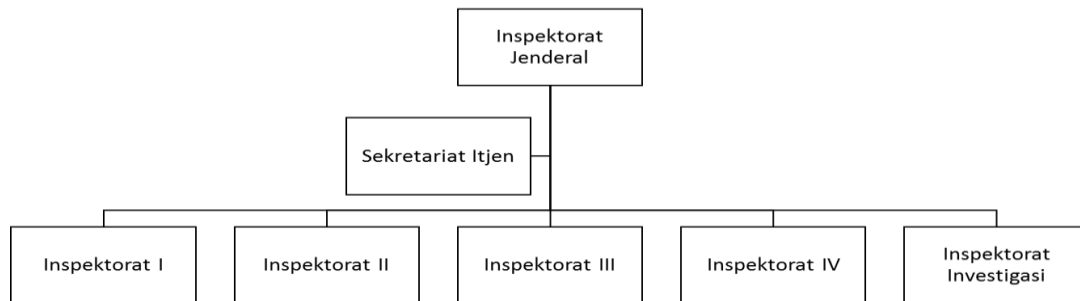
A. ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi; a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat Investigasi

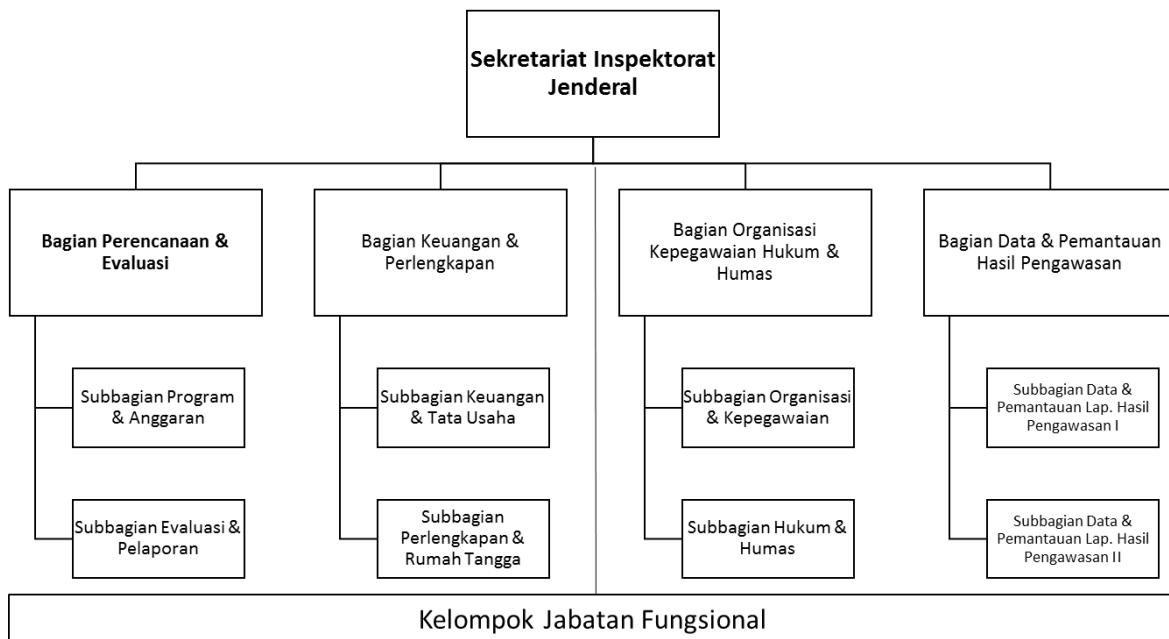
Bagan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 1.
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015

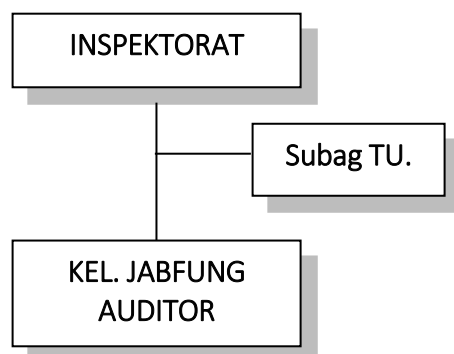


Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal seperti tampak pada gambar berikut:

Gambar 2.
Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015



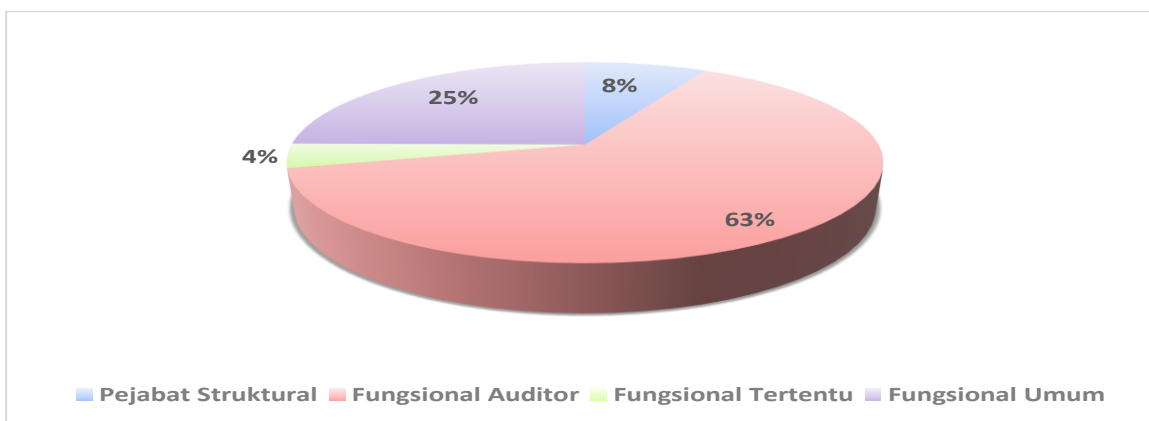
Gambar 3.
Struktur Organisasi Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi Itjentan
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015



B. SUMBER DAYA MANUSIA

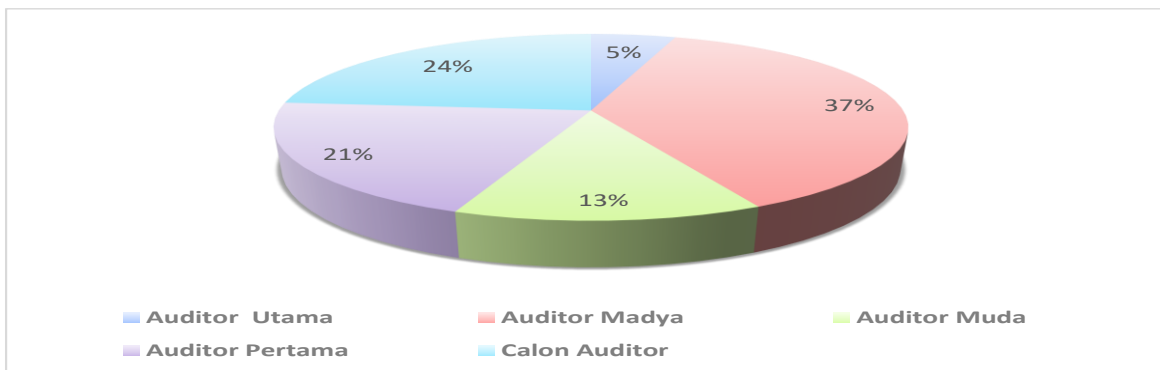
Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sampai dengan Desember 2018 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 307 pegawai dengan rincian sebagai berikut : 195 orang (64%) fungsional Auditor, 12 orang (4%) fungsional tertentu (fungsional kepegawaian, fungsional perencana, arsiparis dan pranata humas), 24 orang (8%) pejabat struktural, dan 76 orang (25%) fungsional umum.

Gambar 4.
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan



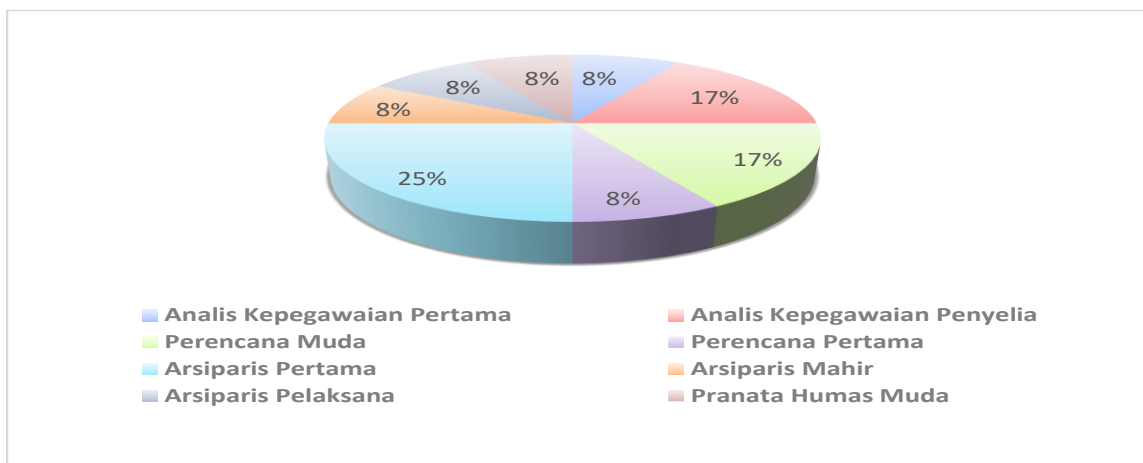
Komposisi fungsional auditor yang berjumlah 195 orang dapat dijabarkan sebagai berikut : 10 orang (5%) Auditor Utama, 73 orang (37%) Auditor Madya, 26 orang (13%) Auditor Muda, 40 orang (21%) Auditor Pertama, dan 46 orang (24%) Calon Auditor, sebagaimana yang tergambar berikut ini:

Gambar 5.
Data Komposisi Fungsional Auditor



Komposisi fungsional tertentu yang berjumlah 12 orang terdiri dari 1 orang (8%) Analis Kepegawaian Pertama, 2 orang (17%) Analis Kepegawaian Penyelia, 2 orang (17%) orang Perencana Muda, 1 orang (8%) Perencana Pertama, dan 3 orang (25%) Arsiparis Pertama, 1 orang (8%) Arsiparis Mahir, 1 orang (8%) Arsiparis Pelaksana dan 1 orang (8%) Pranata Humas Muda.

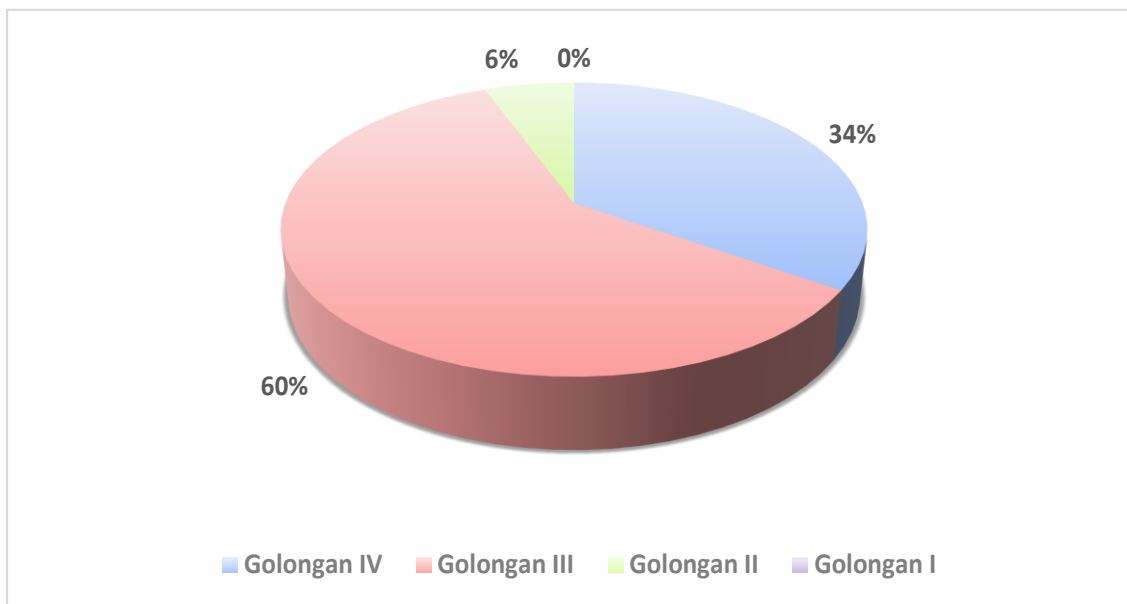
Gambar 6.
Data Komposisi Fungsional Tertentu



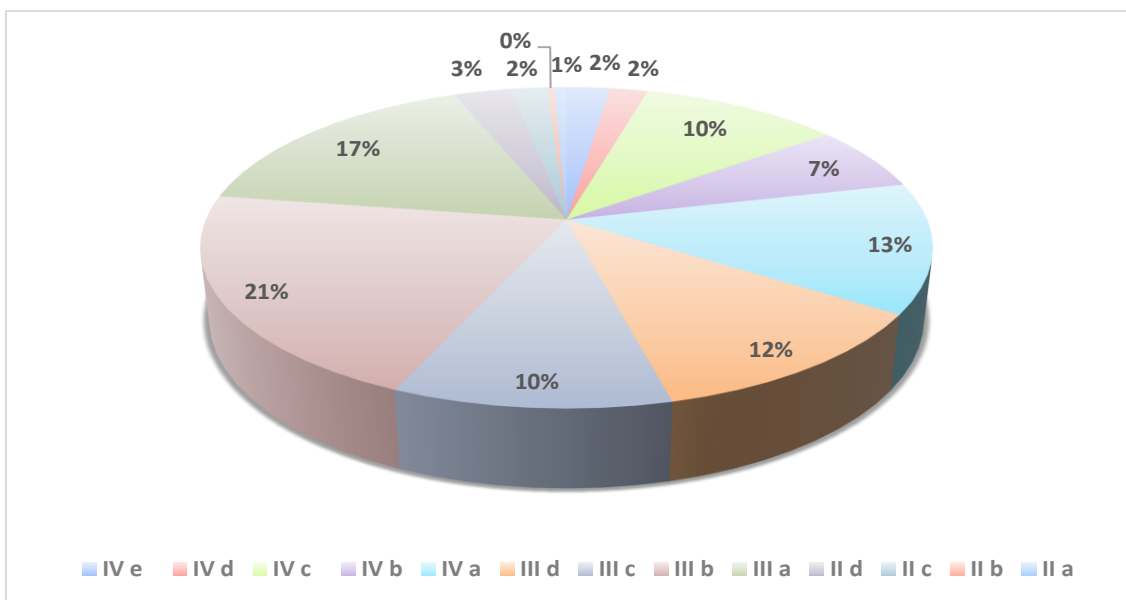
Berdasarkan golongan dan ruang, pegawai Inspektorat Jenderal terdiri dari 106 orang (35%) golongan IV, 183 orang (60%) golongan III, 18 orang (6%) golongan II, dan 0 orang (0%) golongan I.

Secara lebih rinci komposisi golongan dan ruang dipaparkan sebagai berikut : 7 orang (2%) golongan IV/e, 6 orang (2%) golongan IV/d, 33 orang (11%) golongan IV/c, 20 orang (7%) golongan IV/b, 40 orang (13%) golongan IV/a, 36 orang (12%) golongan III/d, 32 orang (10%) golongan III/c, 64 orang (21%) golongan III/b, 51 orang (17%) golongan III/a, 9 orang (3%) golongan II/d, 6 orang (2%) golongan II/c, 1 orang (0%) golongan II/b, 2 orang (1%) golongan II/a, dan tidak terdapat pegawai dengan golongan I.

Gambar 7.
Data Pegawai Berdasarkan Golongan



Gambar 8.
Data Pegawai Berdasarkan Rincian Golongan



BAB III

KERAGAAN ANGGARAN

A. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN

1. Alokasi Anggaran Tahun 2018

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diberikan amanah untuk melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan total anggaran yang dikelola sebesar Rp97.134.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Belanja Tahun 2018

Kode/ Program/ Kegiatan/ MAK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/MAK/ URAIAN PENGELUARAN	PAGU	(%)
1	2	3	4
018.02.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN	97.134.000.000	100,00
51	Belanja Pegawai	23.727.000.000	24,43
52	Belanja Barang	70.556.110.000	72,64
53	Belanja Modal	2.850.890.000	2,94

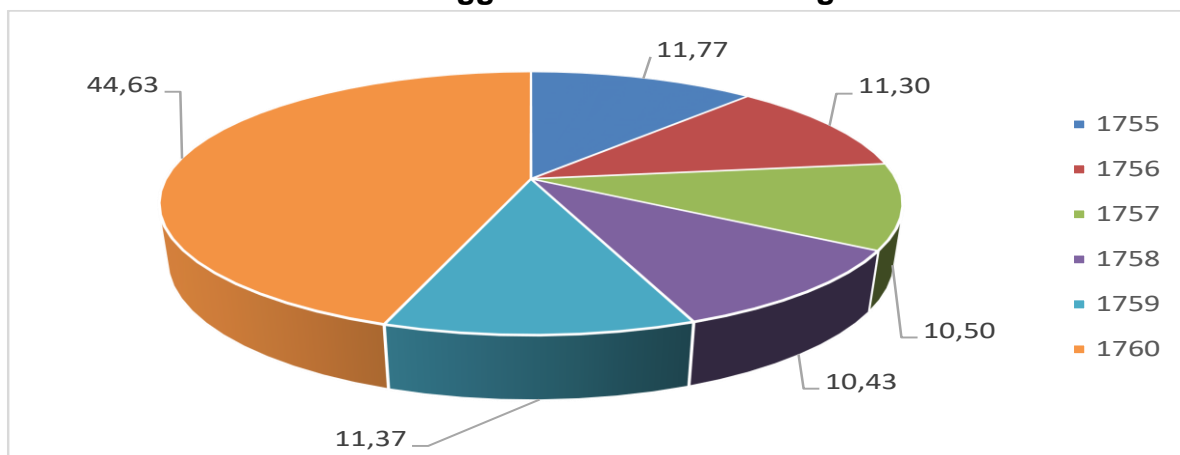
Sumber Data: RKAKL Tahun 2018

Tabel 2.

Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2018

No.	Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)	Proporsi (%)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN			97.134.000.000	100,00
1	1755	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan BPPSDMP	11.435.100.000	11,77
2	1756	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	10.972.300.000	11,30
3	1757	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP	10.195.600.000	10,50
4	1758	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	10.135.800.000	10,43
5	1759	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada satker lingkup Kementerian Pertanian	11.044.800.000	11,37
6	1760	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	43.350.400.000	44,63

Sumber Data: RKAKL Tahun 2018

Gambar 9.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Proporsi anggaran terbesar pada kegiatan 1760 (Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal) yang dikelola Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dengan proporsi sebesar 44,63% dari total anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Jumlah anggaran tersebut sebagian besar adalah untuk layanan internal sebesar 98,70% (terutama belanja modal lainnya 99,60% dan belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung & bangunan 100%).

Tabel 3.

Alokasi Anggaran berdasarkan Output Inspektorat & Sekretariat Tahun 2018

KODE/ PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT URAIAN PENGELUARAN	VOLUME KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4
018.02.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN		97.134.000.000
1755	PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA SATKER LINGKUP SETJEN, DITJEN HORTIKULTURA, DAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN		11.435.100.000
1755.010	REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA pada SATKER LINGKUP SETJEN, DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA, dan BADAN PENYULUHAN dan PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	144 REK.	3.401.304.000
1755.011	REKOMENDASI HASIL PENGAWALAN SPIP lingkup SETJEN, DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA, dan BADAN PENYULUHAN dan PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	144 REK.	2.767.266.000
1755.012	REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA, DAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN SERTA REVIU SAKIP KEMENTERIAN	11 REK.	210.810.000
1755.013	REKOMENDASI HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN dan REVIU RKAKL pada Satker lingkup SEKRETARIAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA, DAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN SERTA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN	49 REK.	882.328.000
1755.965	LAYANAN AUDIT INTERNAL	59 Layanan	4.173.392.000
1756	PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA SATKER LINGKUP DITJEN TANAMAN PANGAN dan DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN		10.972.300.000
1756.010	REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA pada SATKER LINGKUP DITJEN TANAMAN PANGAN dan DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	130 REK.	3.375.804.000
1756.011	REKOMENDASI HASIL PENGAWALAN SPIP pada SATKER LINGKUP DITJEN TANAMAN PANGAN DAN DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	144 REK	2.767.266.000
1756.012	REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP ES.I LINGKUP DITJEN TANAMAN PANGAN dan DITJEN PRASARANA dan SARANA PERTANIAN	6 REK	69.000.000
1756.013	REKOMENDASI HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN dan REVIU RKAKL PADA SATKER LINGKUP DITJEN TANAMAN PANGAN dan DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	30 REK	368.570.000
1756.965	LAYANAN AUDIT INTERNAL	79 Layanan	4.391.660.000
1757	PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA SATKER LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN, BADAN LITBANG PERTANIAN DAN BADAN KETAHANAN PANGAN		10.195.600.000
1757.010	REKOMENDASI HASIL AUDIT pada SATKER LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN, BADAN LITBANG PERTANIAN dan BADAN KETAHANAN PANGAN	141 REK	3.401.304.000
1757.011	REKOMENDASI HASIL PENGAWALAN SPIP LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN, BADAN LITBANG PERTANIAN dan BADAN KETAHANAN PANGAN	144 REK	2.767.266.000
1757.012	REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP ES.I LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN, BADAN LITBANG PERTANIAN dan BADAN KETAHANAN PANGAN	9 REK	94.500.000
1757.013	REKOMENDASI HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN dan REVIU RKAKL PADA SATKER LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN, BADAN LITBANG PERTANIAN dan BADAN KETAHANAN PANGAN	45 REK	535.980.000
1757.965	LAYANAN AUDIT INTERNAL	111 Layanan	3.396.550.000
1758	PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA SATKER LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DAN BADAN KARANTINA PERTANIAN		10.135.800.000
1758.010	REKOMENDASI HASIL AUDIT pada SATKER LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN dan BADAN KARANTINA PERTANIAN	153 REK	3.494.928.000
1758.011	REKOMENDASI HASIL PENGAWALAN SPIP LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN dan BADAN KARANTINA PERTANIAN	144 REK	2.767.266.000
1758.012	REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP ESELON I lingkup INSPEKTORAT JENDERAL, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN dan BADAN KARANTINA PERTANIAN	9 REK	76.500.000
1758.013	REKOMENDASI HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN dan REVIU RKAKL PADA SATKER LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN dan BADAN KARANTINA PERTANIAN	45 REK	502.230.000
1758.965	LAYANAN AUDIT INTERNAL	93 Layanan	3.294.876.000
1759	PELAKSANAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PADA SATKER LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN		11.044.800.000
1759.010	REKOMENDASI HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU	213 Rek	5.271.646.000
1759.965	LAYANAN AUDIT INTERNAL	117 Layanan	5.773.154.000
1760	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA PADA INSPEKTORAT JENDERAL		43.350.400.000
1760.950	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I	12 Bln/Layanan	13.122.710.000
1760.951	LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	12 Layanan	2.850.890.000
1760.994	LAYANAN PERKANTORAN	12 Bln/Layanan	27.376.800.000

Sumber Data: RKAKL Tahun 2018

Dari tabel diatas kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi kegiatan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, pendampingan serta kegiatan pengawasan lainnya lingkup Inspektorat I, II, III, IV. Dari semua kegiatan tersebut yang paling menonjol pada kegiatan Audit Kinerja dengan total anggaran sebesar Rp13.673.340.000,00, dengan volume kegiatan 568 rekomendasi. Untuk Inspektorat Investigasi melaksanakan kegiatan Audit Tujuan Tertentu serta upaya pencegahan korupsi.

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Layanan Internal (Overhead) dan Layanan Perkantoran. Dari ketiga kegiatan tersebut, anggaran yang paling besar ada pada kegiatan Layanan Perkantoran sebesar Rp27.376.800.000,00.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi anggaran sebesar Rp91.872.402.577,00 atau 94,58% dari total anggaran sebesar Rp97.134.000.000,00. Berikut rincian perkembangan realisasi anggaran bulanan sebagaimana tabel berikut:

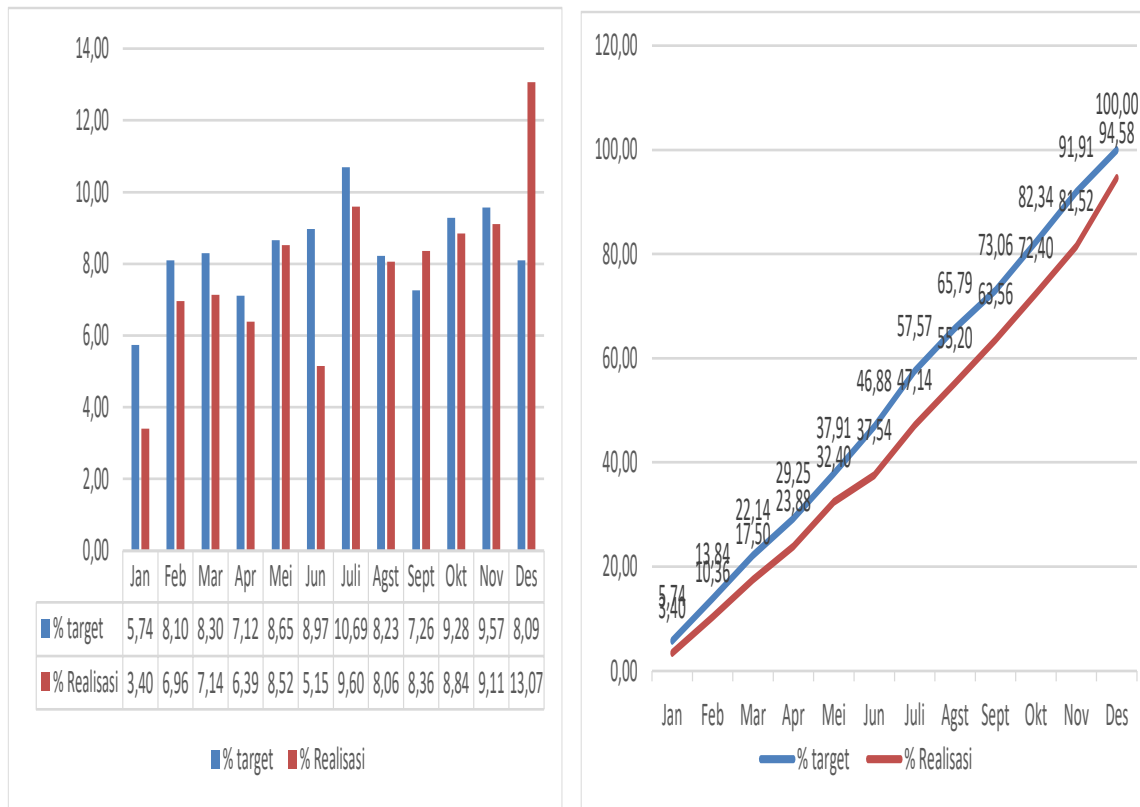
Tabel 4. Realisasi Bulanan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018

Bulan	Target				Realisasi			
	Bulanan		Kumulatif		Bulanan		Kumulatif	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
JAN	5.578.355.170	5,74	5.578.355.170	5,74	3.301.771.136	3,40	3.301.771.136	3,40
FEB	7.864.479.534	8,10	13.442.834.704	13,84	6.758.274.432	6,96	10.060.045.568	10,36
MARET	8.058.907.534	8,30	21.501.742.237	22,14	6.933.910.818	7,14	16.993.956.386	17,50
APRIL	6.911.863.334	7,12	28.413.605.571	29,25	6.202.113.333	6,39	23.196.069.719	23,88
MEI	8.405.432.534	8,65	36.819.038.105	37,91	8.274.179.865	8,52	31.470.249.584	32,40
JUN	8.715.649.834	8,97	45.534.687.938	46,88	4.998.600.693	5,15	36.468.850.277	37,54
JULI	10.382.997.534	10,69	55.917.685.472	57,57	9.323.995.246	9,60	45.792.845.523	47,14
AGUS	7.991.108.834	8,23	63.908.794.305	65,79	7.826.317.695	8,06	53.619.163.218	55,20
SEPT	7.055.359.334	7,26	70.964.153.639	73,06	8.120.450.600	8,36	61.739.613.818	63,56
OKT	9.013.897.034	9,28	79.978.050.673	82,34	8.586.508.748	8,84	70.326.122.566	72,40
NOP	9.293.673.314	9,57	89.271.723.986	91,91	8.852.993.253	9,11	79.179.115.819	81,52
DES	7.862.276.014	8,09	97.134.000.000	100,00	12.693.286.758	13,07	91.872.402.577	94,58
TOTAL	97.134.000.000							

*Realisasi bulan desember didasarkan atas dokumen per SP2D

Gambar 10.

Perkembangan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018 Per Bulan dan Kumulatif



Berdasarkan gambar 10 (sebelah kiri), terlihat bahwa realisasi anggaran sampai dengan bulan Nopember 2018 cenderung lebih rendah dibanding target pada bulan bersangkutan . Hal tersebut mengindikasikan kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana. Realisasi anggaran lebih tinggi dibanding target terlihat pada bulan Desember 2018, dimana prosentasi realisasi anggaran sebesar 13,07% dibandingkan targetnya sebesar 8,09%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penumpukan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Risiko yang menyertai kondisi tersebut adalah kurang tertibnya administrasi kegiatan, sehingga dilakukan pengendalian yang lebih intensif.

Berdasarkan gambar 10 (sebelah kanan), terlihat bahwa realisasi anggaran secara kumulatif terdapat simpangan atau bias antara target dan realisasi kumulatif, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dibawah target.

Pagu anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2018 sebesar Rp97.134.000.000,00 seluruhnya berasal dari rupiah murni. Adapun rincian realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Realisasi Per Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018

Kode/ Program/ Kegiatan/ MAK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/MAK/ URAIAN PENGELUARAN	PAGU	Jumlah Realisasi s/d Bulan ini Rp	Sisa Pagu	(%) REAL. THD PAGU
1	2	3	4	5	6
018.02.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN	97.134.000.000	91.872.402.577	5.261.597.423	94,58
51	Belanja Pegawai	23.727.000.000	21.819.083.325	1.907.916.675	91,96
52	Belanja Barang	70.556.110.000	67.239.511.661	3.316.598.339	95,30
53	Belanja Modal	2.850.890.000	2.813.807.591	37.082.409	98,70

3. Monitoring Penerbitan Laporan

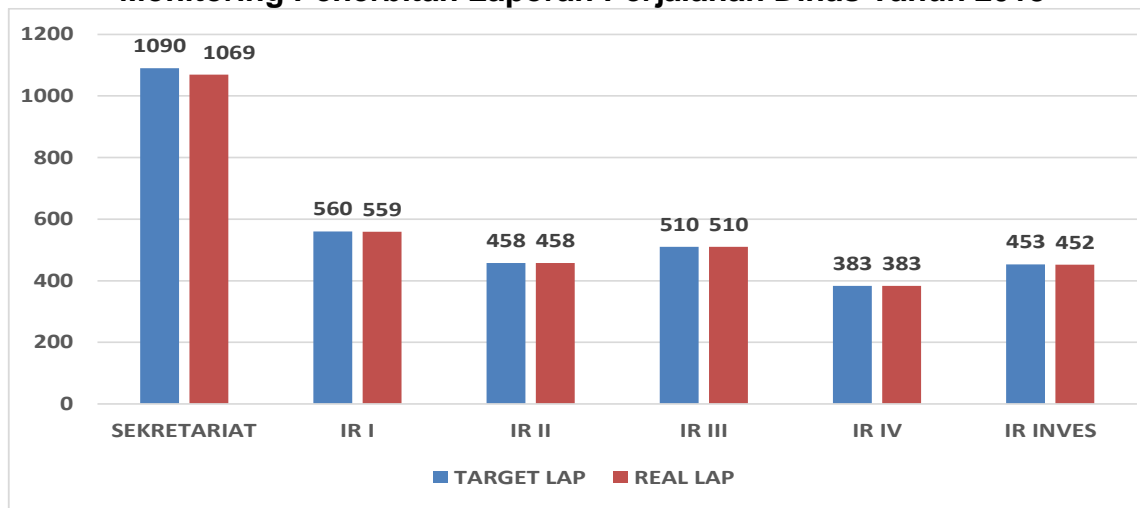
Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atau tim telah selesai melaksanakan tugasnya. Posisi perkembangan penerbitan laporan sampai dengan 31 Desember 2018 yang dipantau melalui aplikasi SIMWAS.

Tabel 6.
Monitoring Penerbitan Laporan Perjalanan Dinas Tahun 2018

ESELON II	Jumlah PP	Target Laporan	LAPORAN TERBIT				LAPORAN BELUM TERBIT			
			Laporan Terbit	%	Tepat Waktu	Terlambat	Belum Terbit	%	Masuk Masa KK	Terlambat
Sekretariat	1090	1090	1090	100,00	98	992	0	0,00	0	0
Inspektorat I	560	560	559	99,82	185	374	1	0,18	0	1
Inspektorat II	458	458	458	100,00	106	352	0	0,00	0	0
Inspektorat III	510	510	510	100,00	391	119	0	0,00	0	0
Inspektorat IV	383	383	383	100,00	191	192	0	0,00	0	0
Inspektorat Investigasi	453	453	452	99,78	13	439	1	0,22	0	1
Total	3.454	3.454	3.452	99,94	984	2.468	2	0,06	0	2

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2018 (posisi 31 Des 2018)

Gambar 11.
Monitoring Penerbitan Laporan Perjalanan Dinas Tahun 2018



Sampai dengan 31 Desember 2018 laporan yang belum terbit/belum selesai antara lain Inspektorat I masih terdapat 1 laporan, Inspektorat Investigasi masih terdapat 1 laporan. Secara rinci laporan perjalanan dinas yang belum terbit bisa dilihat pada lampiran1.

B. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2018 dengan realisasi anggaran sebesar Rp92.247.744.073,00 atau 94,97%. Beberapa capaian kinerja dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Audit (meliputi Audit Kinerja, Audit Pengadaan Barang Jasa/PBJ, Audit Barang Milik Negara/BMN, Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu); 2) Pengawasan Sistem Pengendalian Intern kegiatan; 3) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP Eselon I dan Reviu SAKIP Kementerian; 4) Reviu Laporan Keuangan Eselon I dan Reviu Kementerian; 5) Pengawasan Lainnya; 6) Pendampingan Workshop Penyusunan LK Eselon I; 7) Pendampingan dalam rangka Swasembada Pangan/UPSUS dan SIWAB; 8) Evaluasi Strategis; 9) Pembinaan/Penilaian/Assessment Maturitas SPIP; 10) Pembinaan/penilaian mandiri (self assessment) pembangunan ZI WBK/WBBM. Secara rinci capaian Inspektorat Jenderal terdeskripsi pada lampiran 2.

BAB IV

KERAGAAN KEGIATAN

Sejalan dengan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, setiap kementerian/lembaga harus merestrukturisasi program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan *performance based budgeting* sehingga setiap unit kerja harus memiliki indikator kinerja, merencanakan program/kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi capaian indikator kinerjanya sendiri. Secara umum strategi pengawasan Itjen Kementan diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan pertanian, meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Hal ini di arahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas dan keekonomisan dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian dengan mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pemberian rekomendasi strategis. Secara internal, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terus menerus meningkatkan kapabilitasnya melalui peningkatan kapasitas, kompetensi SDM dan kewenangan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan non pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal diyakini telah menerapkan prinsip-prinsip pemeriksaan dalam menghasilkan rekomendasi strategis dimaksud sebagai wujud berfungsinya pengawasan.

A. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.2459/Kpts/PW.170/H/12/2015 tentang Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, maka Kebijakan operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada 8 (delapan) kegiatan strategis dalam rangka mendukung swasembada (padi, jagung, kedelai, daging, gula, bawang merah, cabai dan kakao) melalui peningkatan pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur Negara. Adapun kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran 3.

Berikut adalah hasil pencapaian kinerja, dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Tahun 2018

No	Uraian	Output				Anggaran	Realisasi	%	Biaya Per Output	Efisiensi	Nilai Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	%						
Mendukung Misi 1											
1	Audit Kinerja	Rekomedasi	568	577	101,58	13.673.340.000	13.446.153.451	98,34	23.303.559	3,20	57,99
2	Pengawasan	Rekomedasi	576	560	97,22	11.069.064.000	10.964.012.860	99,05	19.578.594	-1,88	45,30
3	Evaluasi SAKIP	Rekomedasi	35	40	114,29	450.810.000	365.914.255	81,17	9.147.856	28,98	122,44
4	Reviu LK dan Reviu RKAKL	Rekomedasi	169	193	114,20	2.289.108.000	2.105.064.645	91,96	10.907.071	19,48	98,69
5	Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu	Rekomedasi	118	133	112,71	5.271.646.000	4.736.439.297	89,85	35.612.326	20,29	100,71
7	Layanan Audit Internal	Laporan	459	459	100,00	16.094.698.000	15.267.925.740	94,86	33.263.455	5,14	62,84
			1.925	1.962	101,92	48.848.666.000	46.885.510.248	95,98	21.968.810	10,74	76,85
Mendukung Misi 2											
1	Pembinaan/Penilaian (assessment) Maturitas SPIP	Rekomendasi	198	219	110,61	1.590.990.000	1.521.853.950	95,65	6.949.105	13,52	83,79
2	Pembinaan/penilaian mandiri (self assessment) pembangunan ZI WBK/WBBM	Laporan	67	69	102,99	3.343.944.000	3.200.382.934	95,71	46.382.361	7,07	67,67
			265	288	108,68	4.934.934.000	4.722.236.884	95,69	26.665.733	10,29	75,73
Mendukung Misi 3											
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Peningkatan Nilai Kapabilitas APIP	Laporan	587	587	100,00	43.350.400.000	40.264.655.445	92,88	68.593.962	7,12	67,80
Nilai Total			2.777,00	2.837,00	102,16	97.134.000.000	91.872.402.577	94,58	32.383.646	10,29	75,72

1. Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan sebagai pengembangan dari audit keuangan. Audit kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu Kementerian/Lembaga Pemerintah dan untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran dari kegiatan yang menggunakan anggaran. Oleh karena audit kinerja (*performance audit*) merupakan perluasan dari audit keuangan yang meliputi: ekonomis, efisien dan efektifitas. Dengan memperhatikan hal tersebut maka auditor yang akan melaksanakan kegiatan harus memperoleh informasi tentang organisasi, meliputi struktur organisasi, prosedur kerja, sistem informasi, pelaporan keuangan dan kegiatan. Audit Kinerja meliputi Audit Ketaatan/Kepatuhan, Audit Pengadaan Barang/Jasa, Audit Pelayanan, Audit Barang Milik Negara, Audit Tindaklanjut Atas Hasil Inventarisasi dan Revaluasi Barang Milik Negara.

Berdasarkan data pada tabel 7 diatas, terlihat bahwa Itjen Kementan telah menggunakan anggaran untuk audit kinerja senilai Rp 13.446.153.451,00 atau 98% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 13.673.340.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 568 rekomendasi tertera di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2018, tercapai sebanyak 577 rekomendasi (102%). Pada tahun 2018, keragaan pelaksanaan Audit Kinerja dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8.
Keragaan Tema Audit Kinerja Tahun 2018

NO	TEMA	LOKASI	PELAKSANAAN
	AUDIT LINGKUP Ir.I		
1	Audit Ketaatan	Jabar, Jateng, Papua Barat, DIY, Jatim, Kalsel, NTT	Mei 2018
		Sulsel, Jabar, Jatim, Sumsel, Sumut	Agustus 2018
		Jabar, DKI Jakarta	Nopember 2018
		Jabar, DKI Jakarta	Desember 2018
2	Audit Pengadaan Barang/Jasa	Riau, Maluku, Kaltara, Kalsel, DIY, Sumut	Pebruari 2018
		Kepri, Maluku, Sultra, Kaltara, Kalsel, Banten, Sumut	Maret 2018
		Sulteng	Agustus 2018
		Papua Barat, Jatim, Jateng, Sulut, NTT, Kalteng	Oktober 2018
		Jatim, Jabar, Jateng, Lampung	Nopember 2018
		Jabar, Sumbar	Desember 2018
3	Audit Barang Milik Negara (BMN)	Aceh, Maluku, Sulbar, Sulteng, Sultra, DIY, Jatim	Agustus 2018
	AUDIT LINGKUP Ir.II		
1	Audit Ketaatan	Lampung, Kalsel, Kalteng, Sumut	Maret 2018
		Lampung, Kalsel, Kalteng, Sumut	April 2018
		Kalbar, Sumbar	Mei 2018
		Bengkulu, Aceh, Jateng, Banten, Sultra, Jabar	Agustus 2018
2	Audit kinerja keg Asuransi Usaha Tani Padi	Banten, Jatim	Juli 2018
	Audit kinerja keg Padi, Jagung & Kedelai	Sulsel, NTB	Juli 2018
	Audit kinerja keg Subsidi Benih	Jakarta, Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, Sumsel	Oktober 2018
2	Audit TL atas Hasil Inventarisasi & Revaluasi BMN	Bali, DIY, Jambi, Kalteng, Lampung, Sumbar, Sumsel	September 2018
3	Audit TL atas Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Keg Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen TP	Sumsel, Kalbar, Sulut	Juli 2018
	AUDIT LINGKUP Ir.III		
1	Audit Ketaatan	Sulut, NTT, Jatim, Sukabumi, Kalteng, Jabar, Maluku, Riau	September 2018
		Sumut, Babel, Kalbar	Oktober 2018
		Bengkulu, Sumsel, Sulbar, Maluku	Nopember 2018
2	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan	Bogor, Sukamandi	Pebruari 2018
		Sumbar, Lembang, Gorontalo, Banten, Bogor, Papua Barat	Maret 2018
		Serpong, Jateng, Jatim, Bogor	April 2018
		Sulsel, Jatim	Mei 2018
		Bali, DIY, Bogor	Desember 2018
3	Audit Pengadaan Barang/Jasa	Sumbar, Jambi, Gorontalo, Papua Barat	Pebruari 2018
		Jambi	Maret 2018
		Sulsel	April 2018
		Sumsel, Jabar, Jateng	Mei 2018
4	Inventarisasi dan Verifikasi Aset BMN	Sumut, Sumsel, Jatim, Jabar, Jateng	April 2018
	AUDIT LINGKUP Ir.IV		
1	Audit Ketaatan	Sumut, Jakarta	Mei 2018
		Sumbar, Jabar, DIY, Kalteng, Kalsel, Bali, Banten,	Agustus 2018
		Sumsel, Kalsel, Bali, Gorontalo,	September 2018
		Lampung, Jabar, Kaltim, Sulsel, Sumut	Oktober 2018
		Jabar, Lampung, Jakarta, Banten	Nopember 2018
2	Audit Kinerja Penanganan Gangrep	Sumut, Sumbar, Jateng, Jatim, Sulsel	April 2018
3	Audit Pengadaan Barang/Jasa	Sumut, Kepri, DIY, Kaltim, Jatim, Riau, DKI Jakarta, Jabar, NTT, Sumsel, NTB	Mei 2018
4	Audit Pelayanan	Banten, Jateng, Jatim	Maret 2018
5	Audit Revaluasi Temuan BPK	NTT, NTB, Bali, Sulsel	Oktober 2018

2. Audit Tujuan Tertentu

Audit Tujuan Tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Jenis audit tersebut termasuk diantaranya adalah audit ketaatan, audit *fraud* (kecurangan) dan audit investigatif.

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dikemukakan bahwa, capaian kinerja audit dengan tujuan tertentu tahun 2018 sebanyak 116 rekomendasi atau 116% dari target yang ditetapkan sebesar 100 rekomendasi. Capaian kinerja keuangan untuk kegiatan Audit Tujuan Tertentu sebesar Rp4.224.584.751,00 atau 92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.591.296.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp366.711.249,00 (per tanggal 31 Desember 2018). Pada tahun 2018, keragaan pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9.
Keragaan Tema Audit Tujuan Tertentu Tahun 2018

NO	TEMA	LOKASI	PELAKSANAAN
1	Kinerja dan kepemimpinan	Jambi	April 2018
2	Pelaksanaan Penanaman Bawang Putih oleh Importir Bawang Putih Tahun 2017 dan 2018	Sumut,Jabar,Jatim,Jateng, NTB	April 2018
2	Pengadaan dan penyaluran Benih Jagung Hibrida Varietas Balitbangtan TA. 2017 & TA. 2018	Sulsel,Jatim,Jateng,Jabar, Banten,Sulteng,Kalsel, Sulut,Sumut,Sumbar Gorontalo,Sulsel,Sulbar, Sumbar, NTT, Maluku,NTB, Kalteng,	Mei, Juli, Agustus, Sept, Okt, Nop, Des 2018
3	Pengelolaan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan)	Sumut, Jatim, Sulsel, Jabar, DIY, Papua Barat	Okt 2018

3. Audit Investigasi

Audit Investigasi didasarkan pada instruksi pimpinan, surat pengaduan dari masyarakat dan atau pengembangan lebih lanjut atas hasil pemeriksaan kinerja. Audit Investigasi dengan obyek aparatur pengelola sumberdaya pada kantor pusat dan satuan kerja lingkup Kementan di daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sedangkan yang menyangkut aparatur daerah akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi.

Tujuan pemeriksaan khusus/investigasi adalah untuk memperoleh kejelasan atau kebenaran suatu informasi indikasi adanya tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada tahun 2018, capaian kinerja kegiatan audit investigatif tahun 2018 sebanyak 17 rekomendasi atau 94% dari target yang ditetapkan sebanyak 18 rekomendasi. Capaian kinerja keuangan sebesar Rp 535.211.600,00 atau 79% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 680.350.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp 145.138.400,00 (*per tanggal 31 Desember 2018*).

Pada tahun 2018, keragaan pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10.
Keragaan Tema Audit Investigasi Tahun 2018

NO	TEMA	LOKASI	PELAKSANAAN
1	Penyalahgunaan Bantuan Dana Pemerintah pada Kegiatan Pengembangan Kedelai TA. 2017	Kab. Tapanuli Utara Sumut,	Juli 2018
2	Penyalahgunaan Bantuan Dana Pemerintah pada Kegiatan Pengembangan Jagung Tahun 2016	Kab. Dompus NTB	Juli 2018
3	Pengelolaan Produksi Kedelai TA. 2015	Kab. Jeneponto Sulsel	Des 2018

4. Pengawasan/Pendampingan dan Evaluasi Tahun 2018

Tujuan Pengawasan dan Evaluasi pada unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian adalah melakukan penilaian secara komprehensif terhadap Kegiatan Strategis Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; yakni pada kegiatan yang mempunyai skala nasional, bernilai strategis yang tinggi serta memerlukan anggaran yang cukup besar. Keragaan kegiatan tersebut terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11.
Keragaan Kegiatan Pengawasan/Pendampingan dan Evaluasi Tahun 2018

NO	TEMA	LOKASI	PELAKSANAAN
LINGKUP IR.I			
1	Pengawasan SPIP		
	Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	Jambi, Sumut, Jabar, Jatim, Sulsel,	Maret 2018
	Kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Cabai	Kab. Cianjur, Kab. Sumedang, Jakarta, Kab. Kulonprogo, Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar	April 2018
	Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah	Kab. Garut, Kab. Brebes, Jakarta, Kab. Tegal	April 2018
	Kegiatan Pengadaan Benih Bawang Putih	Kab. Minahasa, Kab. Magelang, Kab. Bantaeng, Sumut, Kab. Majalengka	Agts 2018
		Bali, Sulsel, Sumsel, Sulut, Sumut	Okt 2018
		Kab. Solok, Kab Garut, Kab. Wonosobo	Nop 2018
	Kegiatan Program BEKERJA	Jakarta, Jabar, Jateng, Kab. Garut, Jatim, Banten, Sulsel, Sumsel	Sept 2018
		Sumut, Kab.Bondowoso, Kab. Lumajang	Okt 2018
	Kegiatan Pengadaan Benih Buah Lainnya	Jateng, DIY, Sumut, Sumsel, NTT	Nop 2018
	Kegiatan Pengadaan CPNS Tahun 2018 lingkup Kementerian Pertanian	Bali, Banten, Bengkulu, DIY, Gorontalo, Jambi, Jateng, Kalbar, Kalsel, Kalteng, NTB, Papua, Papua Barat, Sulsel, Sultra, Sumsel, Jabar, Aceh, Maluku, Riau, Sulut, Sumut, Jatim, Sumbar, DKI Jakarta	Okt, Nop 2018
	Kegiatan Pengadaan CPNS Tahap II Tahun 2018 lingkup Kementerian Pertanian	DIY, Jatim, Sumut, Sulsel, Kalsel, Sumsel, Jabar	Des 2018
LINGKUP IR.II			
1	Pengawasan SPIP		
	Kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) Kedelai	Sulut, Sumsel, Jabar	Mei 2018
	Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana Pendukung Program Bekerja	Jatim, Kalsel, Pusat, Sulsel, Sultra, Jabar, Kaltim, Jateng, Lampung,	Agts 2018
	Kegiatan Fasilitasi Sarana Pasca Panen	Sulsel, Sumut, Pusat	Sept 2018
2	Evaluasi Bansos dan Banpem	Kab. Pangkajene, Wajo, Kab.Selayar, Sidrap, Prov. Sulsel	Mei, Juni 2018
LINGKUP IR.III			
1	Pengawasan SPIP		
	Kegiatan Program Peningkatan Produksi Tan Bun	Aceh, Sumut, Sulut, Sulsel, NTT, Maluku, Jabar, Jatim	April 2018
	Keg BEKERJA Lingkup Badan Litbangtan	Bogor, Bandung, NTB, Lampung	Agts 2018
2	Evaluasi Kegiatan Perbanyakan Benih APBNP	Sumut, Sumbar, Babel, Kepri, Jabar (Bogor), Jateng, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Sulsel, Sulut	Juli 2018
		Jabar (Sukabumi), Jabar (Bogor), Banten, Jambi	Agts 2018
	Evaluasi Hasil Pemantauan Ketersediaan Jagung	Lampung (Lampung Selatan dan Lampung Tengah), Jabar (Garut dan Sukabumi), Jateng (Blora, Grobogan, Sragen dan Wonogiri), Jatim (Tuban, Lamongan, Jember dan Kediri), Sulsel (Bone, Gowa dan Jeneponto), Gorontalo (Pohuwato dan Boalemo) dan NTB (Sumbawa).	
LINGKUP IR.IV			
1	Pengawasan SPIP		
	Kegiatan pelayanan satker	Jabar, Lampung	Jan 2018
		Babel, Jambi, Kepri, NTT, Sulut,	Sept 2018
		Kalsel, Maluku, Malut	Okt 2018
		NTT, NTB, Papua, Jatim	Nop 2018
	Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA)	Lampung, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel	Juli 2018
2	Evaluasi BEKERJA TA 2018	Kab.Lampung Selatan, Lumajang, Ogan Komering Ilir, Jember	Des 2018

Dari tabel 11 kegiatan Pengawasan/pendampingan dan Evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat I, II, III dan IV diantaranya:

a. Pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup Inspektorat I, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Sub unsur lingkungan pengendalian, belum memadai diantaranya organisasi satker belum dibentuk, adanya perangkapan jabatan, belum diberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan, uraian tugas belum dibentuk melalui Surat Keputusan, standar kompetensi belum dikembangkan terus menerus sesuai perubahan yang terjadi, prosedur pendelegasian wewenang belum disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, belum membuat perencanaan karir bagi pegawai;
- 2) Penilaian resiko, telah disusun kegiatan pengendalian berupa kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 3) Satker belum membangun unsur informasi dan komunikasi serta pemantauan pelaksanaan SOP, sehingga belum dapat dilakukan pengawasan pada unsur tersebut;
- 4) Satker belum menyusun rancangan evaluasi untuk melakukan penilaian efisiensi, efektivitas dan ketaatan pegawai dan pimpinan dalam menyelenggarakan SOP.

b. Pengawasan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lingkup Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian pada tahun 2018 mendapat formasi CPNS sebanyak 475 orang, terdiri dari formasi Umum sebanyak 345 orang, *Cum Laude* sebanyak 112 orang, Disabilitas sebanyak 10 orang dan Putra/Putri Papua sebanyak 8 orang.

Dari kegiatan pengawasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah pelamar *on line* seluruhnya sebanyak 28.420 orang. Berdasarkan hasil pengawasan disampaikan bahwa pelamar yang lulus seleksi administrasi *on line* di 26 lokasi pengawasan sebanyak 21.341 orang (75,09%), hadir dan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebanyak 18.343 orang (85,95%), Lulus SKD (Memenuhi Passing Grade dan Peringkat Terbaik dari angka nilai kumulatif

SKD) sebanyak 1.725 orang (9,40%), hadir dan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebanyak 1.673 orang (96,99%), lulus seleksi akhir CPNS sebanyak 804 orang,

- 2) Pada tahap akhir, dari jumlah yang lulus seleksi akhir sebanyak 804 orang, yang melakukan verifikasi dokumen dan pemberkasan tanggal 8 sampai 10 Januari 2019 sebanyak 795 orang (99,13%), sebanyak 5 orang tidak melakukan pemberkasan, sebanyak 2 orang mengundurkan diri sebagai CPNS (a.n Akmal Fikri untuk formasi Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil dan Agnetha Lintang Rinastiti untuk formasi jabatan Dosen sisten Ahli di Polbangtan Magelang) dan sebanyak 2 orang tidak memenuhi persyaratan atau tidak lulus untuk dilanjutkan pemberkasan menjadi CPNS,
- 3) Peserta yang tidak memenuhi persyaratan yaitu: a) atas nama Ulfiani Saleh untuk jabatan Paramedik Veteriner Terampil di Badan Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, tidak lulus karena kualifikasi pendidikan pelamar D-IV jurusan Manajemen Agribisnis program studi Manajemen Agroindustri, sedangkan persyaratan jenjang pendidikan D-III jurusan/program studi Kesehatan Hewan/Peternakan; b) Atas nama Ana Nur Faiza untuk jabatan Analais Kepegawaian Terampil di Badan Karantina Pertanian Kelas I Batam, tidak lulus karena kualifikasi pendidikan pelamar Administrasi Niaga program studi Administrasi Bisnis, sedangkan persyaratannya jurusan/program studi Administrasi Pemerintahan/Administrasi Negara/Manajemen SDM,
- 4) Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan seleksi CPNS seluruhnya dapat diselesaikan di lokasi kegiatan, namun masih terdapat hasil verifikasi administrasi *on line* yang kurang cermat, yaitu masih terdapat peserta yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan namun dinyatakan lulus verifikasi dan dapat mencetak kartu ujian serta lulus seleksi akhir CPNS, namun peserta tersebut tidak lulus pada saat verifikasi dokumen dan pemberkasan karena dokumen kelengkapannya tidak sesuai dengan persyaratan.

- c. Pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup Inspektorat II, dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Sub unsur Lingkungan Pengendalian, belum adanya standar kompetensi untuk masing-masing pelaksana kegiatan, selain itu PPK belum membentuk tim ahli/tim pemeriksa barang,
 - 2) Identifikasi resiko, tim pengawasan/pembinaan SPIP telah melakukan pendampingan dan pembinaan SPIP untuk melakukan identifikasi resiko atas kegiatan yang telah dilaksanakan,
 - 3) Penilaian Resiko, yang diidentifikasi telah dirumuskan kegiatan pengendalian dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP),
 - 4) Penerapan unsur informasi dan komunikasi, tim pengawasan/pembinaan SPIP bersama dengan pihak satker telah menyusun formulir informasi dan komunikasi atas setiap penyelenggaraan kegiatan/SOP,
 - 5) Unsur pemantauan, tim pengawasan/pembinaan SPIP telah menyusun rencana pemantauan berupa jadwal waktu/time schedule kegiatan pemantauan untuk masing-masing tahap untuk kegiatan yang telah dilaksanakan.
- d. Pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup Inspektorat III, dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Satker telah membangun tiga dari lima unsur sistem pengendalian pemerintah (SPIP) yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko serta Kegiatan Pengendalian. Satker belum membangun unsur pemantauan Pengendalian Intern (Pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan SPIP);
 - 2) Satker telah membuat rancang kendali untuk menghilangkan atau meminimalisir resiko telah ditetapkan SOP Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) Satker belum membangun dan menyelenggarakan 2 unsur yaitu Informasi dan Komunikasi Kegiatan pokokserta pemantauan pelaksanaan Kegiatan/SOP.

- e. Pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup Inspektorat IV, dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Dari 5 unsur SPIP, satker telah membangun 4 unsur yaitu Evaluasi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian berupa pelaksanaan aktivitas pengendalian risiko berupa SOP serta informasi dan komunikasi, sedangkan unsur pemantauan pengendalian intern belum dibangun;
 - 2) Berdasarkan hasil penilaian risiko telah diidentifikasi risiko yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan dan dari hasil analisis risiko telah dibangun rancang pengendalian yaitu SOP;
 - 3) Satker telah mengkomunikasikan hasil penilaian risiko beserta aktivitas pengendaliannya pada seluruh jajaran manajemen satker;
 - 4) Satker belum melakukan pemantauan dan evaluasi aktivitas pengendalian risiko sesuai dengan rancang kendali risiko yang telah ditetapkan.
- f. Evaluasi Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah lingkup Inspektorat II, dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Hasil Evaluasi terhadap ketetapan sasaran bantuan sosial dan pemerintah menunjukkan bahwa pada umumnya penerima bantuan telah melalui proses seleksi administrasi, tetapi ada sebagian yang tidak mengajukan proposal dikarenakan bantuan yang diterima merupakan kombinasi bantuan saprodi dan bantuan alsintan,
 - 2) Dalam penerimaan bantuan tidak ada pungutan dalam pengajuan bantuan sosial dan bantuan pemerintah tapi ada sebagian responden yang menyatakan adanya biaya dikarenakan jarak yang sangat jauh yaitu di kabupaten.
 - 3) Terkait dengan penyimpanan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Baran menunjukkan kelompok tani tidak diberikan BAST atau Tanda terima sebagai arsip, BAST tersebut setelah ditandatangani diserahkan kembali kepada penyedia barang melalui petugas lapangan.

- g. Evaluasi Kegiatan Perbanyak Benih APBNP-P TA 2017 Lingkup Badan Litbang, berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan sebagai berikut:
- 1) Realisasi keuangan kegiatan perbanyak benih tanaman sebesar 85,42% sedangkan pencapaian fisik 91,44%. Rendahnya realisasi keuangan dan fisik kegiatan tersebut diantaranya disebabkan terbatasnya waktu pelaksanaan APBN-P dan kesulitan benih,
 - 2) Penetapan jenis dan jumlah komoditas benih yang diperbanyak belum berdasarkan perhitungan kebutuhan pengembangan komoditas di masing-masing wilayah,
 - 3) Badan Litbang telah menyiapkan petunjuk teknis produksi benih komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan yang cukup rinci namun belum ditetapkan secara formal melalui Keputusan Kepala Badan,
 - 4) Proses produksi benih didukung alokasi anggaran yang memadai untuk melanjutkan proses produksi benih sampai menghasilkan benih berkualitas sampai tahun 2018 khususnya biaya pemeliharaan, sertifikasi dan distribusi. Satuan kerja yang mengalokasikan biaya pemeliharaan sebanyak 77,27%, biaya sertifikasi 50% dan biaya distribusi 0%,
 - 5) Realisasi perbanyak benih tanaman perkebunan bersertifikat sebanyak 7.724.311 batang (85,67%) dari target produksi benih sebanyak 9.016.330 batang, dan tersalur sebanyak 6.030.299 batang (78,07%) dari yang disertifikasi. Dari benih yang sudah tersalur tersebut, telah ditanam sebanyak 5.419.659 batang dan masih terdapat saldo benih sebanyak 3.647.747 batang atau 37,69% dari produksi benih sebanyak 9.678.048 batang,
 - 6) Realisasi perbanyak benih tanaman hortikultura yang telah disertifikasi sebanyak 1.026.134 batang atau 41,74% dari target produksi benih dan telah disalurkan sebanyak 505.900 batang atau 49,30% dari benih yang telah disertifikasi. Dari benih yang sudah tersalur tersebut sudah ditanam sebanyak 436.438 batang dan masih terdapat saldo benih sebanyak 1.776.208,30 batang atau 73,60% dari realisasi benih sebanyak 2.413.291 batang,
 - 7) Usulan permintaan benih dari dinas provinsi/kabupaten telah diterima satker pengelola perbanyak benih sebanyak 36,36% usulan belum dilengkapi


dengan hasil identifikasi CP/CL yang telah ditetapkan kepala dinas sebagai calon penerima bantuan benih,

- 8) Seluruh satuan kerja penyelenggara perbanyak benih (100%) telah melakukan pencatatan benih tanamana sebagai barang persediaan dengan nilai perolehan sebesar nilai bahan baku, sedangkan pencatatan benih sebagai persediaan barang setengah jadi dan barang persediaan siap salur hanya dilakukan oleh 9,09% satuan kerja atau sebanyak 90,90% satuan kerja belum melakukan pencatatan.

h. Evaluasi Hasil Pemantauan Ketersediaan Jagung lingkup Inspektorat III

Evaluasi Hasil Pemantauan Ketersediaan Jagung Tahun 2018 telah dilaksanakan pada 18 Kabupaten di 7 Provinsi yang terdiri dari Provinsi Lampung (Lampung Selatan dan Lampung Tengah), Provinsi Jawa Barat (Garut dan Sukabumi), Provinsi Jawa Tengah (Blora, Grobogan, Sragen dan Wonogiri), Provinsi Jawa Timur (Tuban, Lamongan, Jember dan Kediri), Provinsi Sulawesi Selatan (Bone, Gowa dan Jeneponto), Gorontalo (Pohuwato dan Boalemo) dan NTB (Sumbawa). Berdasarkan Evaluasi Hasil Pemantauan Ketersediaan Jagung Tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Kondisi Ketersediaan Jagung dari hasil pemantauan bahwa ketersediaan/stok jagung pada 12 kabupaten (66,67 %) di 7 provinsi sebanyak 2.204 ton pipilan kering (PK) dan 180 ton pipilan basah (PB) seluruhnya terdapat di tingkat pedagang, sedangkan di tingkat petani tidak terdapat stok karena saat pemantauan telah melewati masa panen yaitu bulan Juli/Agustus. Selain hal tersebut, petani tidak melakukan penyimpanan stok hasil panen melainkan langsung menjual kepada pedagang.
- 2) Kondisi Produksi Jagung dari hasil pemantauan terhadap panen jagung bulan Agustus-Oktober 2018 pada 15 kabupaten (83,33%) di 7 provinsi, produksi jagung sebanyak 6.073.422,80 ton dari luas panen 839.544,16 ha dengan produktivitas sebesar 72,34 ku/ha. Selain itu terdapat 3 kabupaten (16,67%) yaitu Kabupaten Garut, Sukabumi dan Kabupaten Gowa tidak tersedia data produksi dan luas panen jagung.

- 
- 3) Kondisi Kebutuhan Jagung berdasarkan data kebutuhan jagung nasional tahun 2018 dari Januari sampai Desember 2018 (selama satu tahun) sebanyak 15.558.317 ton, namun data kebutuhan jagung untuk masing-masing provinsi dan kabupaten tidak tersedia. Meskipun kebutuhan jagung untuk pakan ternak lokal hanya sebanyak 2.520.000 ton atau 15,98% dari seluruh kebutuhan sebanyak 15.558.317 ton, namun kelangkaan jagung di daerah sering menimbulkan kegaduhan karena terkait asosiasi ternak dan pedagang jagung lokal.
 - 4) Kondisi Potensi Produksi Jagung dari hasil pemantauan terhadap 15 kabupaten di 7 provinsi bahwa potensi luas panen pada bulan November - Desember 2018 seluas 227.060,18 ha dengan potensi produksi sebanyak 1.369.078,13 ton. Selain itu terdapat 3 kabupaten (16,67%) yang tidak tersedia data potensi luas panen dan potensi produksi.
 - 5) Harga Jagung dari hasil pemantauan pada 18 kabupaten 7 provinsi terhadap harga jagung pipilan kering ditingkat petani dengan harga terendah senilai Rp3.300,00/kg dan harga tertinggi senilai Rp5.250,00/kg, ditingkat pedagang kecamatan/desa terendah senilai Rp3.800,00/kg dan tertinggi senilai Rp5.300,00/kg serta ditingkat pedagang kabupaten/kota terendah senilai Rp4.000,00/kg dan tertinggi senilai Rp5.700,00/kg.
 - 6) Penanganan Panen Bersifat Konvensional, pada umumnya petani pada saat panen menjual seluruh hasil panen ke pedagang pengumpul baik ditingkat desa/kecamatan maupun ditingkat kabupaten (konvensional). Hal tersebut untuk menyederhanakan rantai pasok dan petani enggan untuk fasilitasi biaya penyimpanan, sedangkan kebutuhan pakan jagung sangat tinggi sepanjang waktu sehingga pada saat diluar panen terjadi kelangkaan jagung ditingkat lapangan.
 - 7) Penilaian Perangkat dan Data Pemantauan dari hasil pemantauan pada 18 kabupaten di 7 provinsi terhadap penilaian perangkat dan data pemantauan bahwa untuk kelengkapan data hanya dipenuhi dengan score 55 %, sumber dan validitas data dengan score 90% serta metodologi dengan score 36%.

i. Evaluasi Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) lingkup Inspektorat IV

Evaluasi Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera telah dilaksanakan pada bulan November 2019, di 3 Provinsi, yaitu Lampung, Jatim, Sumsel, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Target pengadaan bibit sebanyak 82.550 ekor terealisasi sebanyak 81.750 ekor (99,03%), karena terdapat 16 RTM pindah tempat;
- 2) Target pengadaan pakan sebanyak 499.800 kg terealisasi 317.250 kg (63,48%), dikarenakan penyaluran pakan secara bertahap sebanyak 3 kali;
- 3) Bantuan ayam yang diserahkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) jenisnya bervariasi pada satu RTM sehingga menyebabkan ayam saling mematok;
- 4) Perbandingan jumlah ternak jantan dan betina jumlahnya 50/50 karena pengadaan ayam unsexing, sehingga menjadikan petani bingung, karena untuk jenis ayam jantan tidak akan produksi telur, membutuhkan pakan yang banyak, sedangkan petani tidak berani menjual ayam;
- 5) Tugas pendamping belum maksimal, karena petugas pendamping yang ditetapkan rata-rata bukan dari PPL atau medic/paramedic, sehingga pengetahuan untuk beternak, atau budidaya sayuran tidak dimilikinya;
- 6) Masalah budidaya oleh RTM masih belum dijelaskan, sehingga petani masih belum memahami untuk pengelolaan selanjutnya, sedangkan pakan sudah mulai habis dan tidak ada dana untuk pengadaan pakan;
- 7) Beberapa desa lebih cocok untuk komoditas ternak/kambing karena tersedia pakan hijauan yang melimpah;
- 8) Evaluasi perkembangan bantuan itik tidak dapat dilakukan karena tidak termasuk sampel evaluasi.

j. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi : (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Kinerja, dan (5) Capaian Kinerja; ditujukan untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan memberikan saran perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Hasil Evaluasi AKIP Eselon I Kementerian Pertanian disajikan pada tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 12.
Keragaan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I

NO	ESELON I	NILAI	KATEGORI
1	SEKRETARIAT JENDERAL	82,21	A (Sangat Baik)
2	INSPEKTORAT JENDERAL	84,63	A (Memuaskan)
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	87,49	A (Memuaskan)
4	DITJEN HORTIKULTURA	82,85	A (Memuaskan)
5	DITJEN PERKEBUNAN	82,96	A (Memuaskan)
6	DITJEN PETERNAKAN & KESWAN	81,95	A (Memuaskan)
7	DITJEN PRASARANA & SARANA PERTANIAN	84,01	A (Sangat Baik)
8	BALITBANG	82,29	A (Memuaskan)
9	BPSDMP	83,29	A (Memuaskan)
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	89,40	A (Memuaskan)
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN	90,73	AA (Memuaskan)
RATA-RATA		84,71	Memuaskan

Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018 sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Nomor: B.401/PW.160/G/06/2018 Tanggal 8 Juni 2018 memperoleh nilai 84,63 kategori “A” atau berpredikat Memuaskan.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018, ditetapkan bahwa target Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian 84,00 sehingga tahun 2018 Inspektorat Jenderal telah mampu melebihi target yang telah ditetapkan.

5. Workshop Implementasi SPIP Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal dan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sudah mengarah pada peran consulting partner bagi mitra kerja lingkup Kementerian Pertanian. Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP Kementerian tahun 2017 sebesar 2, 95 (berkembang), dan tahun 2018 ditargetkan mencapai nilai 3 (terdefinisi). Pada Level 3 diharapkan setiap unit kerja telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Sebagai implementasi atas kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal, maka pada tanggal 25 s.d 27 Oktober 2018 dilaksanakan di Yogyakarta, diselenggarakan Workshop Implementasi SPIP Kegiatan Unit Pelayanan Teknis Mitra Kerja Inspektorat IV, yang dihadiri 136 peserta yang merupakan Satlak Pengendalian Intern Eselon I serta UPT/Dinas lingkup Ditjen PKH dan Barantan yang telah dilakukan pengawasan oleh Tim Inspektorat IV Tahun 2017-2018. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah dikawal sebanyak 49 unit kerja meliputi Satlak PI Ditjen PKH, Barantan dan Itjen Kementan serta 15 UPT lingkup Ditjen PKH, 2 Dinas Provinsi yang membidangi peternakan (DIY dan Jawa Tengah) serta 29 UPT lingkup Barantan. Peserta terbaik lingkup Barantan adalah Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian dan peserta terbaik lingkup Ditjen PKH adalah Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.

6. Pelaksanaan Evaluasi Atase Pertanian (ATANI) 2018

Salah satu amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2015 adalah melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkup Kementerian Pertanian. Atase Pertanian mempunyai tugas melakukan kerjasama luar negeri di bidang pertanian yang meliputi bidang teknologi pertanian, sosial ekonomi pertanian, agribisnis, dan informasi-informasi lain yang menyangkut pembangunan pertanian dengan negara dan lembaga internasional/regional yang berkedudukan yang menjadi wilayah observasinya. Tahun 2018 Inspektorat melaksanakan kegiatan evaluasi atase pertanian di Roma Italia dan Brussel Belgia.

Permasalahan yang dihadapi pada Atase Pertanian Roma Italia, yaitu: (1) Realisasi anggaran TA.2017 sebesar Rp1.907.975.035,00 atau 98,42% dari anggaran sebesar Rp1.938.600.000,00. Sedangkan realisasi fisik berdasarkan jenis kegiatan Atase Pertanian secara total tertimbang sebesar 86,01%, karena terdapat satu kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan analisis potensi dan kebijakan pertanian di negara penugasan dan kegiatan dukungan promosi dan investasi sebanyak 4 kali atau 80% dari target yang ditetapkan sebanyak 5 kegiatan; (2) Realisasi anggaran tahun 2018 per tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp1.742.436.792,00 atau 90,61% dari anggaran sebesar Rp1.923.000.000,00. Sedangkan realisasi fisik kegiatan Atase Pertanian TA.2018 sebesar 97,09%, karena ada satu kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu kegiatan analisis potensi dan kebijakan pertanian di negara penugasan; (3) Realisasi penyelesaian perhitungan pihak ketiga (PPK) sampai dengan saat tahun 2018 senilai \$28.112,06 atau 88,97% dari total PPK senilai \$31.597,17, sehingga masih terdapat sisa senilai \$3.485,11; (4) Atase Pertanian Roma Italia belum mengukur kinerja sasaran yang merupakan dampak (outcome) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018; (5) Kegiatan fasilitasi sidang dan pertemuan multilateral dan bilateral hanya fokus di Italia dan belum mencakup negara-negara observasinya; (6) Kegiatan analisis potensi ekspor dan kebijakan pertanian tahun 2017 dan 2018 gagal dilaksanakan; (7) Penatausahaan Aset Atase Pertanian Roma Italia tahun 2018 belum

dimutakhirkan, sehingga terdapat mutase barang hasil pengadaan tahun 2016 senilai Rp9.535.200,00 yang belum diketahui keberadaannya.

Permasalahan yang dihadapi pada Atase Pertanian Brussel Belgia, yaitu: (1) Realisasi anggaran TA.2017 sebesar Rp1.273.477.679 atau 96,94% dari anggaran sebesar Rp1.313.700.000,00. Sedangkan realisasi fisik berdasarkan jenis kegiatan Atase Pertanian secara total tertimbang sebesar 94,41%. Capaian kinerja terendah adalah analisis potensi dan kebijakan pertanian di negara penugasan dan wilayah observasinya sebesar 1 dari target yang ditetapkan sebanyak 2 kegiatan; (2) Realisasi anggaran tahun 2018 per tanggal 30 November 2018 sebesar Rp875.107.574 atau 70,52% dari anggaran sebesar Rp1.240.896.000,00. Sedangkan realisasi fisik kegiatan TA.2018 sebesar 89,65%. Rendahnya realisasi fisik tersebut terlihat pada kegagalan pencapaian dukungan promosi dan investasi hanya 2 atau 50% dari 4 kegiatan yang ditetapkan; (3) Belum mengukur dampak dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan belum membuat laporan analisis perkembangan pertanian, pemasaran, pasar, ekspor, kebijakan pertanian dan harga hasil-hasil pertanian Indonesia kepada Menteri Pertanian; (4) Terdapat alokasi anggaran kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan.

7. Reviu Laporan Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian

Reviu bertujuan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian serta pengakuan, pengukuran, pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas. Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertanian (BA.018) untuk Triwulan III TA.2018. Kementerian Pertanian sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) terdiri 11 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E I) dan 631 Unit Akuntansi

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B). Berdasarkan hasil revidi atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2018, dapat disampaikan catatan penting sebagai berikut:

a. Berdasarkan e-Rekon, terdapat:

- 1) Satker aktif sebanyak 9 satker tanpa status upload SAIBA dan SIMAK-BMN, 3 satker belum melakukan *upload* ulang SAIBA serta 64 satker gagal *upload* data SIMAK-BMN,
- 2) Satker in-aktif sebanyak 179 tanpa status *upload* SAIBA dan SIMAK-BMN serta 6 satker gagal *upload* data SIMAK-BMN,
- 3) Perbedaan data antara SIAP dan SAI atas pendapatan pada 4 satker senilai Rp1.212.561.995,00, pendapatan netto pada 4 satker senilai Rp9.005.681,00, dan belanja pada 9 satker senilai Rp8.681.201.987,00,
- 4) Terdapat transfer keluar BMN yang tidak sesuai dengan transfer masuk senilai Rp1.216.281.297,00 dan transfer masuk BMN yang tidak sesuai dengan transfer keluar senilai Rp4.006.543.655,00,
- 5) Pagu minus pada 76 satker senilai Rp47.898.947.664,00,
- 6) Pengembalian belanja melebihi realisasi belanja pada lima satker senilai Rp7.344.277,00,
- 7) Aset belum diregister pada 95 satker senilai Rp1.039.062.846.419,00,
- 8) Terdapat jurnal tidak lazim pada 163 satker dengan saldo debit senilai Rp35.700.668.569.739,00 dan saldo kredit senilai Rp234.848.066.746,00,
- 9) Terdapat saldo tidak normal pada 17 satker dengan saldo debit senilai Rp357.157.636,00 dan saldo kredit senilai Rp4.419.857.868,00.

b. Terdapat BMN yang memenuhi kriteria revaluasi pada 6 satker senilai Rp4.557.125.550,00, namun belum dilakukan revaluasi,

c. Terdapat kesalahan penyeteroran Pendapatan Bukan Pajak masih menggunakan Kodefikasi Mata Anggaran yang tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-211/PB/2018, tentang kodefikasi Segmen Bagan Akun Standar pada enam Eselon-1 senilai Rp2.732.947.022,00,

d. Terdapat selisih Surplus/Defisit-LO antara Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp800.915.000,00,

e. Terdapat perbedaan saldo aset antara yang tersaji di SAIBA dengan SIMAK-BMN, lebih besar di SIMAK-BMN senilai Rp3.994.061.948,00.

8. Reviu RKAKL

Tujuan reviu RKAKL Pagu Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal TA.2019 adalah memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa RKAKL pagu alokasi anggaran yang disusun telah sesuai dengan pagu alokasi anggaran K/L yang ditetapkan Menteri Keuangan, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR dalam pembincaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung.

Pelaksanaan Reviu Atas RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA.2019 dilaksanakan di Bogor pada tanggal 23 s.d 24 Oktober 2018, dengan hasil sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementan No.4740/RC.110/A/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Perubahan Rancangan Pagu Alokasi Anggaran lingkup Kementerian Pertanian, pagu alokasi anggaran Inspektorat Jenderal TA.2019 semula senilai Rp92.408.464.000,00 menjadi Rp94.408.464.000,00 dengan rincian belanja barang senilai Rp68.113.388.000,00, belanja modal senilai Rp3.000.000.000,00 dan belanja pegawai senilai Rp23.295.076.000,00;
- b) Penambahan alokasi anggaran senilai Rp2.000.000.000,00 dialokasikan untuk belanja kendaraan operasional roda empat sebanyak 4 unit senilai Rp1.331.716.000,00, pengadaan laptop sebanyak 10 unit senilai Rp180.000.000,00 dan penambahan frekuensi kegiatan monitoring Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai (Upsus Pajale) senilai Rp488.284.000,00. Dalam usulan RKAKL telah sesuai dengan kaidah yang berlaku;
- c) TOR/KAK kegiatan Monitoring Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai (Upsus Pajale) belum menyebutkan rincian penambahan jumlah orang/hari sesuai dengan pertambahan alokasi anggaran.

B. KEGIATAN PENDUKUNG PENGAWASAN LAINNYA

1. Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Kegiatan Rapat Kerja Inspektorat Jenderal (Raker Itjen) tahun 2018 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 29 s.d 31 Januari 2018, berlokasi di Ruang Rapat Ahmad Affandi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang dihadiri oleh 323 orang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan pegawai struktural lingkup Inspektorat Jenderal.

Tema yang diusung pada Raker Itjen kali ini adalah **“Era Baru Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Pencapaian Kinerja APIP untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan”**. Sesuai tema tersebut, diharapkan Itjen Kementan mampu menyamakan pandangan, menyinergikan kegiatan dan memantapkan komitmen bersama melalui koordinasi yang terpadu dalam melaksanakan program strategis bidang pengawasan tahun 2018 yang berbasis teknologi.

Rapat secara resmi dibuka oleh Inspektur Jenderal, Justan Riduan Siahaan, Ak.M.ACC,CA, beliau mengharapkan 1) beberapa kekurangan yang berhasil diidentifikasi pada tahun sebelumnya dapat dievaluasi untuk dicarikan solusi agar pada tahun 2018 seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak mengalami kendala serupa; 2) menyamakan visi dan misi di tingkat unit eselon II, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Itjen berlandaskan indikator kinerja yang ditetapkan; 3) dengan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan intern lingkup Itjen, diharapkan seluruh target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru dan Indikator Kinerja Aktivitas (IKA) serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2018 dapat terealisasi secara utuh, tepat waktu dan tetap memenuhi unsur 3E (efektif, efisien, ekonomis) dan 1T (ketaatan).

2. Kegiatan Penilaian (Assesment) Maturitas Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Pertanian

Kegiatan Penilaian (*assesment*) Maturitas Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui kegiatan yaitu:

a. Penilaian Maturitas SPIP

Inspektorat Investigasi telah melakukan penilaian Maturitas SPIP dengan menggunakan format sesuai Perka BPKP Nomer 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPI Lingkup Eselon I dan sebagai berikut:

Tabel 13.
Penilaian Maturitas SPIP Lingkup Eselon I Tahun 2018

NO	UNIT KERJA	ATRIBUT
1	SEKRETARIAT JENDERAL	TERKELOLA & TERUKUR
2	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	TERKELOLA & TERUKUR
3	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	TERKELOLA & TERUKUR
4	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	TERKELOLA & TERUKUR
5	BADAN LITBANG PERTANIAN JAKARTA	TERKELOLA & TERUKUR
6	BADAN KARANTINA PERTANIAN	TERKELOLA & TERUKUR
7	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	TERKELOLA & TERUKUR
8	INSPEKTORAT JENDERAL	TERDEFINISI
9	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	TERDEFINISI
10	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	TERDEFINISI
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	TERDEFINISI
12	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN TP&H CIMANGGIS	TERDEFINISI
13	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN BOGOR	TERDEFINISI
14	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN BOGOR	TERDEFINISI
15	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN BOGOR	TERDEFINISI
16	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA BOGOR	TERDEFINISI
17	BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN JATISARI	TERDEFINISI
18	BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI SUKAMANDI	TERDEFINISI
19	PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN CIAWI	TERDEFINISI
20	PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN	TERDEFINISI
21	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTU HPT) PADANG MANGATAS	TERDEFINISI
22	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU	TERDEFINISI
23	BALAI PENELITIAN PALMA MANADO	TERDEFINISI
24	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MANADO	TERDEFINISI
25	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR	TERDEFINISI

Sumber Data: Inspektorat Investigasi 2018

LEVEL MATURITAS SPI		ESELON I	UPT	JUMLAH	%
Level IV	TERKELOLA & TERUKUR	7	-	7	28,00
Level III	TERDEFINISI	4	14	18	72,00
Jumlah		11	14	25	100,00

Sumber Data: Inspektorat Investigasi 2018

Dari tabel diatas, Kegiatan Penilaian maturitas penyelenggaraan SPI tingkat Eselon I, 25 unit kerja dengan hasil yang termasuk kategori “Terkelola dan Terukur” sebanyak 7 unit kerja dan kategori ”Terdefinisi” sebanyak 18 unit kerja.

b. Forum Nasional Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kegiatan Forum Nasional SPIP selama 3 (tiga) hari pada tanggal 4 s.d 6 Desember 2018 bertempat di Hotel Margo Kota Depok dengan peserta sebanyak 272 orang atau 100,74% dari target sebanyak 270 orang. Peserta berasal dari pimpinan Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian serta Satker Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian Wilayah Barat Indonesia. Tema yang diusung pada Forum Nasional SPI lingkup Kementerian Pertanian tahun 2018 adalah **“Harmonisasi Bersama SPI, Wujudkan Kesejahteraan Petani”**, mengandung makna bahwa penyelenggaraan sistem pengendalian intern harus dilaksanakan pada kegiatan pokok/utama, mulai pusat, unit pelaksana teknis dan satker lingkup Kementerian Pertanian guna mendukung pencapaian program-program swasembada yang telah menjadi kebijakan pertanian.

Kegiatan Forum SPI bertujuan untuk meningkatkan kematangan (Maturitas) penyelenggaraan SPI pada program dan layanan di lingkungan Kementerian Pertanian. Sasaran kegiatan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada program dan layanan pada setiap instansi lingkup Kementerian Pertanian, sehingga tujuan organisasi/kegiatan dapat dicapai secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keluaran/Output kegiatan Forum SPI adalah rumusan hasil

workshop mengenai penilaian risiko (*risk assessment*) dan manajemen risiko (*risk management*) untuk dikembangkan oleh masing-masing unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, yang pada akhirnya meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPI di Kementerian Pertanian melalui Level III (Terdefinisi). Materi kegiatan Forum SPI meliputi: 1) Maturitas penyelenggaraan SPI pada program dan layanan pertanian untuk mewujudkan program pertanian, 2) Strategi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPI, 3) SPI Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian, 4) Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPI lingkup Kementan tahun 2018 dan Implementasi SPI, 5) Strategi pengawalan pembangunan SPI kegiatan pokok, 6) Workshop penyusunan register risiko kegiatan pokok dan kegiatan pengendaliaannya dan 7) Reviu pelaksanaan kegiatan workshop.

Capaian kinerja keuangan sebesar Rp772.762.550,00 atau 94,10% dari target anggaran sebesar Rp821.195.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp48.432.450,00 (per tanggal 31 Desember 2018).

3. Pembinaan/Penilaian Mandiri (Self Assessment) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM)

Kegiatan Pembinaan Tekad Anti Korupsi di Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui: a) Pemasyarakatan Anti Korupsi, b) Pembinaan Anti Korupsi dan c) Penilaian Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi. Capaian kinerja masing-masing kegiatan dapat diinformasikan sebagai berikut :

a. Pemasyarakatan Anti Korupsi

Kegiatan pemasyarakatan antikorupsi bertujuan untuk mengajak dan mengikutsertakan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sekaligus menjadi pengawas bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian. Kegiatan pemasyarakatan anti korupsi dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2018 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2018 melalui

kegiatan senam bersama WBK, Kampanye Antikorupsi dan Bincang Asyik Pertanian Indonesia (Bakpia). Kegiatan senam bersama dilaksanakan di lapangan upacara Kantor Pusat Kementerian Pertanian dengan jumlah peserta sebanyak ± 750 orang, terdiri dari pimpinan dan pegawai pusat dan warga masyarakat disekitar kantor pusat Kementerian Pertanian.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan himbauan dan ajakan kepada seluruh peserta yang hadir untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam program dan layanan pertanian. Kegiatan kampanye pemberantasan korupsi mengusung tema, **“Gelorakan Spirit Anti Korupsi Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045”**. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pencegahan korupsi dan pembudayaan antikorupsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam mendukung program dan layanan pertanian yang bersih dari pungli/gratifikasi dan bebas korupsi.

Capaian kinerja keuangan sebesar Rp148.292.500,00 atau 86,04% dari target sebesar Rp172.350.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp24.057.500,00 (per tanggal 31 Desember 2018).

b. Pelaksanaan Pembinaan Tekad Antikorupsi

Pembinaan Tekad Antikorupsi Korupsi, melalui PROTANI diarahkan untuk mewujudkan program dan layanan pertanian yang bersih dan bebas pungutan liar/pungli, mendorong pencapaian program pangan berkelanjutan melalui pengendalian pelaksanaan program dan pelayanan pertanian, serta pembangunan tunas-tunas Integritas di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mengawal penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Pertanian, seperti masalah lahan, prasarna dan sarana pertanian, inovasi teknologi pertanian dan pengadaan barang/jasa serta pungutan liar di bidang pelayanan pertanian.

Kegiatan Protani dimaksudkan untuk mengawal terwujudnya program pangan berkelanjutan dan pelayanan pertanian menuju lumbung pangan dunia melalui pembudayaan nilai-nilai agraris guna meningkatkan integritas, etos kerja dan gotong royong di lingkungan Kementerian Pertanian. Tujuan kegiatan Protani

untuk menghasilkan modalitas utama melalui membangun SDM pertanian yang religious, professional, visioner dan berintegritas, untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian, penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang modern dan tepat guna dan berhasil guna serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pegawai Kementerian Pertanian berdasarkan kebijakan, inovasi dan nilai-nilai agraris yang telah ditetapkan.

Kegiatan Pembinaan Tekad Antikorupsi pada Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14.
Kegiatan PROTANI Tahun 2018

PROVINSI	PESERTA	PELAKSANAAN	TEMA
Sumsel	166	7 s.d 9 Mei 2018	"Petani Mulia Pro Pangan Dunia" untuk Mewujudkan Program dan Layanan Petanian Yang Bersih dan Bebas Pungli
NTB	199	6 s.d 8 Nopember 2018	"NTB Bangkit Tanpa Sakit" untuk mewujudkan program Swasembada Pangan Berkelanjutan Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045

Dari tabel diatas kegiatan Protani di NTB dengan tema " "NTB Bangkit Tanpa Sakit" untuk mewujudkan program Swasembada Pangan Berkelanjutan Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, terkandung maksud bahwa pembinaan Protani sebagai salah satu upaya untuk mengajak NTB Bangkit setelah didera bencana gempa bumi yang dahsyat beberapa bulan yang lalu serta untuk memberikan pemahaman akan arah dan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan Pemerintah (Banpem) dalam mewujudkan program/kegiatan dan layanan pertanian secara efektif dan efisien.

Sedangkan kegiatan Protani di Sumsel dengan tema " Petani Mulia Pro Pangan Dunia" untuk Mewujudkan Program dan Layanan Petanian Yang Bersih dan Bebas Pungli.

c. Penilaian dan Penetapan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM)

Penilaian unit kerja WBK Tahun 2018 didasarkan atas Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM). Inspektorat Jenderal pada Tahun 2018 melakukan penilaian Pembangunan ZI-WBK-WBBM terhadap unit kerja pusat dan daerah.

Hasil penilaian terhadap 61 unit kerja dinyatakan lulus sebagai unit kerja berpredikat WBK yang terdiri dari 11 unit eselon I dan 50 unit pelaksana teknis. Penyerahan penghargaan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilakukan pada saat acara Forum Nasional SPI Kementerian Pertanian di Depok oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 4 – 6 Desember 2018. Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) Pembangunan ZI-WBK/WBBM yang ditetapkan dengan SK Mentan RI No.841/Kpts/PW.410/12/2018 tanggal 4 Desember 2018 disajikan pada Lampiran 3.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, maka Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah mengusulkan Calon Unit Kerja WBK/WBBM tingkat Nasional ke Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi yaitu 4 unit pelaksana teknis (UPT) untuk memperoleh predikat unit kerja WBBM dan 15 unit pelaksana teknis (UPT) untuk memperoleh predikat unit kerja WBK. Kementerian PAN dan RB telah menetapkan 1 unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pertanian sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan menetapkan 3 unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pertanian sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Nasional, yaitu Balai Besar Karantina Pertanian Makasar, Balai Besar Veteriner Denpasar dan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya.

5. Pengendalian Gratifikasi

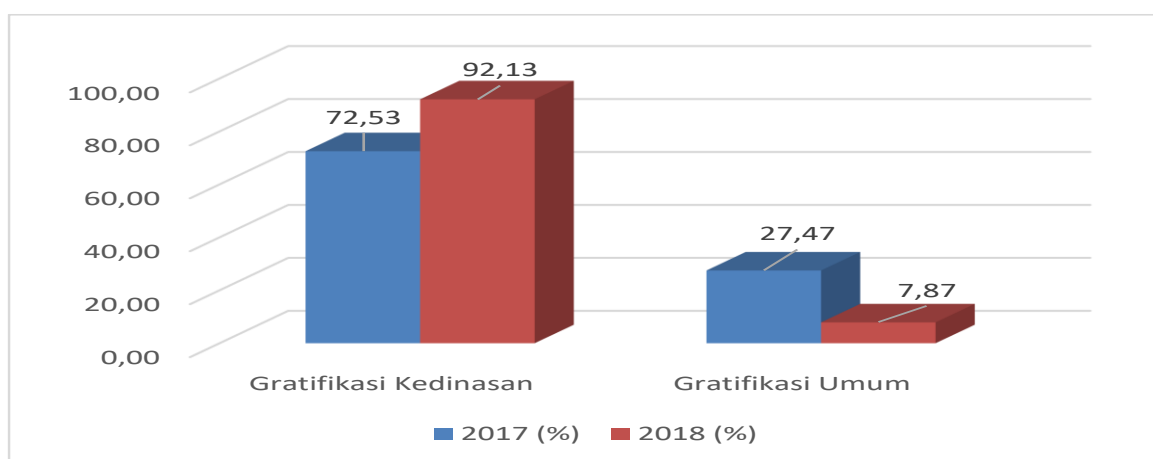
Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan kesadaran anti korupsi dan menekan tindakan KKN di lingkungan Kementerian Pertanian, telah diterbitkan Permentan No. 97/OT.210/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Kementerian Pertanian.

Inspektorat Investigasi selaku Sekretariat UPG Kementerian Pertanian secara rutin telah melaporkan perkembangan penerimaan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap bulan dan triwulan. Laporan UPG Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15.
Laporan Unit Pengelola Gratifikasi Tahun 2018

No	Jenis Laporan	2017		2018	
		Jumlah Kejadian	%	Jumlah Kejadian	%
1	Gratifikasi Kedinasan (honor narasumber, perjalanan dinas, honor kegiatan lainnya)	132	72,53	351	92,13
2	Gratifikasi Umum (uang, barang, makanan)	50	27,47	30	7,87
Jumlah Gratifikasi		182		381	

Gambar 12.
Laporan Unit Pengelola Gratifikasi Tahun 2018



Sebagaimana grafik diatas memperlihatkan bahwa kesadaran aparat sipil negara untuk melaporkan gratifikasi kedinasan cukup tinggi dan tingkat penolakan terhadap gratifikasi umum berkurang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Kementerian Pertanian pada kategori Kementerian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2018 dengan dilaunching secara online aplikasi pelayanan gratifikasi online di <http://sigap-upg.pertanian.go.id>

Prestasi ini sebagai bentuk komitmen Inspektorat Jenderal dalam menginisiasi seluruh pegawai lingkup Kementerian Pertanian dalam mewujudkan nilai-nilai KKPID (Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas, dan Disiplin) bagi ASN Kementerian Pertanian.

Gambar 13.
Piagam Penghargaan Kementerian Pertanian
Dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2018



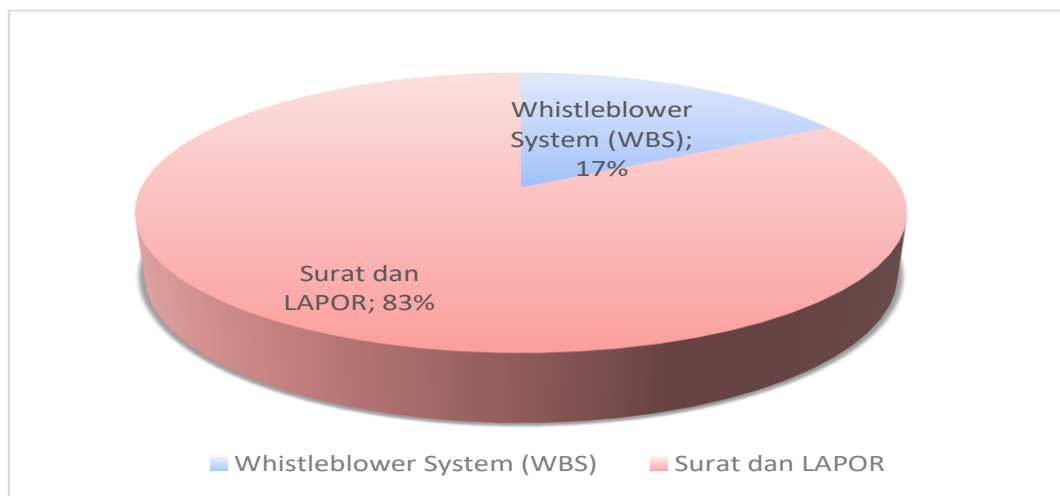
6. Penanganan Pengaduan Masyarakat

a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan WBS

Pengelolaan pengaduan masyarakat dan WBS di Kementerian Pertanian ditangani oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 788/Kpts/OT.210/H/06/2014 tentang Administratur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaan WBS Kementerian Pertanian. Berdasarkan data pengaduan masyarakat yang masuk tahun 2018,

bahwa Inspektorat Investigasi menerima 42 pengaduan terdiri dari pengaduan melalui Whistleblower System (WBS) sebanyak 7 pengaduan (semester I sebanyak 4 pengaduan dan semester II sebanyak 3 pengaduan) dan pengaduan melalui surat dan LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) sebanyak 35 pengaduan (semester I sebanyak 20 pengaduan dan semester II sebanyak 15 pengaduan).

Gambar 14.
Pengaduan Masyarakat Tahun 2018



b. Tindak lanjut Atas Pengaduan Masyarakat

Terhadap pengaduan yang telah diterima, sebanyak 42 pengaduan telah ditindaklanjuti dengan dilakukan telaahan, sebanyak 42 pengaduan atau 100% memenuhi unsur-unsur pengawasan (berkadar pengawasan).

c. Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat telah dilakukan oleh Inspektorat Investigasi, namun terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyempurnaan, diantaranya pada bulan Desember 2018 aplikasi WBS mengalami kendala di sistemnya dan telah dilakukan perbaikan oleh Pusdatin. Pada bulan Januari 2019 telah direncanakan penyederhanaan sistem.

C. PENINGKATAN KAPABILITAS

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan

a. Seminar Peningkatan Kompetensi Pengawasan Auditor 4.0 Guna Mengawal Akuntabilitas Program dan Kegiatan Lingkup Kementerian Pertanian.

Kegiatan seminar dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 21 Desember 2018 di Hotel Batiqa Lampung, dengan peserta seminar 34 orang yang terdiri dari 31 orang CPNS dan 3 orang PNS Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Narasumber pada seminar ini adalah Justan Riduan Siahaan (Inspektur Jenderal), Susanto (Inspektur I), Tin Latifah (Inspektur II), Bambang Pamuji (Inspektur III), IGMN Kuswandana (Inspektur IV), Sotarduga Hutabarat (Inspektur Investigasi) dan para pejabat fungsional peneliti dari BPTP Lampung serta para auditor senior yang mewakili dari masing-masing Inspektorat.

Kegiatan seminar bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon auditor tentang teknis pengawasan yang meliputi reviu, evaluasi, pengawalan SPIP dan audit; untuk melakukan praktik pengawasan meliputi reviu, evaluasi, pengawalan SPIP dan audit melalui simulasi; untuk melakukan praktik budidaya tanaman semusim (padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah) serta mempelajari bisnis prosesnya; memberikan bekal kepada calon auditor untuk menjadi auditor 4.0 yang *capable* dan *multitasking*.

Kegiatan yang dilakukan yaitu: 1) Seminar tentang Reviu RKAKL dan simulasi reviu; 2) Seminar tentang budidaya tanaman semusim (padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah); 3) Kunjungan lapang budidaya tanaman padi, jagung, cabai merah; 4) Seminar tentang pengawalan SPIP dan simulasi analisis risiko kegiatan audit 2019; 5) Seminar dan simulasi kegiatan evaluasi; 6) Seminar dan simulasi audit kinerja; 7) Seminar peran auditor dalam era revolusi industri 4.0 dan simulasi reviu laporan hasil audit; 8) Seminar dan simulasi mengenai audit investigasi.

b. Diklat Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) Eselon II BPKP dan Kementerian/Lembaga TA.2018

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, salah satunya dilakukan melalui Pelatihan Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA). QIA merupakan sertifikasi profesi dalam bidang audit internal yang menunjukkan kualitas dan profesionalisme dari individu yang memilikinya. Sertifikat QIA juga merupakan pengakuan bahwa yang bersangkutan telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sejajar dengan kualifikasi auditor internal tingkat Internasional. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan keahlian/ketrampilan, serta sikap professional agar dapat melaksanakan tugas-tugas manajerial pengawasan secara lebih professional, efisien dan efektif.

Diklat Qualified Internal Audit diselenggarakan selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 1 s.d 10 Desember 2018 bertempat di Hotel Santika Premier Bintaro. Diklat ini diselenggarakan oleh BPKP bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA). Peserta Diklat Qualified Internal Audit adalah Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

c. Diklat Penjenjangan Auditor Pertama, Auditor Muda Auditor Utama dan Diklat Pimpinan IV

Penyelenggaraan diklat ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern. Sasaran dari diklat tersebut diharapkan terwujudnya audior yang (1) memiliki pengetahuan, keahlian/keterampilan dan sikap professional sesuai dengan Standar Kompetensi Auditor; (2) mampu mengimplementasikan pengetahuan keahlian/keterampilan dan sikap professional yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan secara efisien dan efektif; (3) mampu memelihara dan

mengembangkan pengetahuan, keahlian/keterampilan dan sikap professional secara berkelanjutan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.

Diklat Penjenjangan Auditor Pertama lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dan Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Lampung selama 22 hari dari tanggal 21 Nopember s.d 12 Desember 2018 dengan jumlah peserta 34 orang yang terdiri dari 31 orang CPNS dan 3 orang PNS. Ujian akan dilaksanakan pada bulan April 2019 di Jakarta.

Diklat Penjenjangan Auditor Muda lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan bekerjasama dengan Perwakilan BPKP selama 19 hari dari tanggal 17 September s.d 4 Oktober 2018 di Ciawi Bogor, dengan jumlah peserta 18 Auditor lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan telah dinyatakan lulus ujian.

Diklat Penjenjangan Auditor Utama lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan bekerjasama dengan Perwakilan BPKP selama 16 hari dari tanggal 22 Nopember s.d 7 Desember 2018 di Ciawi Bogor, dengan jumlah peserta 6 Auditor lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan telah dinyatakan lulus ujian.

Diklat Pimpinan IV Kementerian Pertanian Tahun 2018 dilaksanakan di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Bogor selama 35 hari dari tanggal 11 Februari s.d 29 Juni 2018, dengan jumlah peserta 3 orang.

d. Diklat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar

Diklat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar merupakan pelatihan yang dapat memberikan pembekalan awal bagi para peserta untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa tingkat dasar/pertama. Kurikulum yang diberikan berdasarkan 19 standar kompetensi dalam rangka memahami Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kompetensinya dengan “metode coaching” dengan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang kompeten dalam pelaksanaan pengadaan. Kegiatan diklat dilaksanakan di Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal di PPMKP Ciawi Bogor selama 5 hari, dengan peserta 1 orang.

2. Pelaksanaan peningkatan Kapabilitas APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) / IACM (*Internal Audit Capability Model*)

IACM (*Internal Audit Capability Model*) pada dasarnya merupakan *tools* dalam meningkatkan kapabilitas yang merupakan upaya memperkuat, meningkatkan,

Untuk meningkatkan kapabilitas APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sebagai *shareholder* APIP serta pimpinan APIP sendiri. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi Pembina APIP telah mengadopsi model penilaian IIA dalam sebuah pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1633/K/JF/2011 tentang pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 tahun 2015 tentang *grand design* peningkatan kapabilitas APIP.

Pada tahun 2018 Itjen telah melakukan Self Assessment terhadap Tata Kelola Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Semester I Tahun 2017 dengan hasil penilaian telah memenuhi level 3. Upaya perbaikan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal dalam pemenuhan seluruh pernyataan untuk menuju Level 3 (Integrated) adalah:

- a. Menyusun SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan, dan penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan sesuai dengan Lampiran I Permen PAN dan RB Nomor 42 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sedang membentuk Komite Audit
- c. Telah dibuat dan diterapkan sistem informasi *online* untuk mendukung pengelolaan kegiatan pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Selain itu kami telah membangun metode pengumpulan dan

pengolahan data IACM menggunakan aplikasi Access guna dilakukan monitoring tindaklanjutnya.

- d. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian secara aktif menghadiri undangan baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra kerja. Disamping itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menyusun serangkaian kegiatan yang mengarah pada pemberian konsultasi, dan pengawalan kegiatan mitra kerja.
- e. Disamping telah beroperasinya SIMWAS, pada tahun 2018 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sedang membangun aplikasi berbasis internet/*online*, yaitu e-audit, e-audit tujuan tertentu, e-evaluasi, e-pengawalan, dan e-reviu
- f. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI sedang menyusun peraturan terkait tatakelola pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI.

g. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Sejak tahun anggaran sebelum 2014 sampai dengan 2018 jumlah kerugian negara yang diinventarisir sejumlah Rp397.287.137.996,17. Dari jumlah temuan kerugian negara tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp307.025.613.828,82 atau 77,28% sehingga masih terdapat sisa kerugian negara sebesar 90.261.524.167,35 atau 22,72%. Dari hasil jumlah temuan kerugian negara tahun 2014 s.d 2018 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16.
Deskripsi Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun 2014 s.d. 2018

Tahun Anggaran	Jumlah Temuan	Penyelesaian	%	Sisa	%
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	
s.d TA. 2014	162.481.328.456,48	116.122.029.279,80	71,47	46.359.299.176,68	28,53
TA. 2015	106.041.012.963,01	87.532.111.714,26	82,55	18.508.901.248,75	17,45
TA. 2016	25.590.661.088,04	23.242.398.542,45	90,82	2.348.262.545,59	9,18
TA. 2017	18.945.659.271,66	13.518.692.777,14	71,36	5.426.966.494,52	28,64
TA. 2018	84.228.476.216,98	66.610.381.515,17	79,08	17.618.094.701,81	20,92
TOTAL	397.287.137.996,17	307.025.613.828,82	77,28	90.261.524.167,35	22,72

Sumber Data: dari Bagian DPLHP

Data persebaran kerugian negara per unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 17.
Data Nilai Kerugian Negara Per Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018

No	Eselon I	Nilai KN	Ditindaklanjuti	Sisa	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Sekretariat Jenderal	366.568.131,00	366.568.131,00	-	100,00
2	Inspektorat Jenderal	0	0	-	0,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	72.906.331.776,31	58.932.681.835,00	13.973.649.941,31	80,83
4	Ditjen Hortikultura	2.864.632.501,52	1.555.201.895,00	1.309.430.606,52	54,29
5	Ditjen Perkebunan	1.296.336.334,00	203.975.433,24	1.092.360.900,76	15,73
6	Ditjen PKH	566.699.275,00	162.043.250,00	404.656.025,00	28,59
7	Ditjen PSP	1.110.740.655,80	1.078.040.655,80	32.700.000,00	97,06
8	Badan Litbang Pertanian	3.548.990.489,34	3.044.031.891,12	504.958.598,22	85,77
9	Badan PPSDMP	1.003.200.138,17	702.861.508,17	300.338.630,00	70,06
10	Badan Ketahanan Pangan	377.285.376,91	377.285.376,91	-	100,00
11	Badan Karantina Pertanian	187.691.538,93	187.691.538,93	-	100,00
Jumlah		84.228.476.216,98	66.610.381.515,17	17.618.094.701,81	79,08

Sumber Data: dari Bagian DPLHP

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah temuan kerugian negara terbesar adalah pada Ditjen Tanaman Pangan yaitu Rp72.906.331.776,31 atau 86,56% dari seluruh temuan kerugian negara, sedangkan jumlah temuan kerugian negara paling kecil adalah pada Badan Karantina Pertanian yaitu sebesar Rp187.691.538,93 atau 100% dari seluruh temuan kerugian negara. Secara umum, upaya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya pemantauan dan tindak lanjut atas kerugian negara telah diupayakan dengan maksimal.

h. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal melalui serangkaian kegiatan pengawasan. Pada tahun 2018, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengadaan diantaranya pengadaan alat pengolah data dan informasi; pengadaan aplikasi elektronik; pengadaan prasarana dan sarana kantor; pengadaan prasarana dan sarana gedung; pengadaan kendaraan bermotor; pembangunan gedung dan renovasi gedung bangunan. Secara ringkas beberapa jumlah dan kondisi sarana yang pengadaan di tahun 2018 tertera pada Lampiran 4.

BAB VI

P E N U T U P

Pada tahun 2018 secara umum capaian kegiatan Inspektorat Jenderal telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian masih diperlukan pengendalian yang lebih efektif sehingga pelaksanaan program/kegiatan lebih akuntabel dari sisi pelaporan, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dikelola. Hal tersebut perlu dilakukan agar laporan tahunan ini lebih efektif sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh pimpinan dan lebih bermanfaat bagi *stakeholder*.

Lampiran 1. Monitoring Laporan Perjalanan Dinas Yang Belum Terbit Tahun 2018

IR I				
NO	LAPORAN YANG BELUM TERBIT	No ST	Tgl MT	Ketua Tim
1	Melaksanakan Audit (Audit Compliance) pada Satker Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian TA 2017 di Jakarta (lanjutan)	B.0530/PW.130/ G.2/12/2018	19/12/2018	Uun Undayasari, SP, M.Ak
IR INVESTIGASI				
NO	LAPORAN YANG BELUM TERBIT	No ST	Tgl MT	Ketua Tim
1	Melakukan Audit Tujuan Tertentu Lanjutan atas Pengadaan Benih Jagung Hibrida Varietas Balitbangtan TA. 2017 & TA. 2018 Provinsi Sulawesi Selatan.	B.0412/PW.120/ G.6/12/2018	11/12/2018	

Lampiran 2. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018

No		KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH OUTPUT				KET	
				PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI				
				Rp.	Rp.	%		OUTPUT	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	018.02.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN		97.134.000.000	91.872.402.577	94,58					94,99	
I	1755	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan BPPSDMP		11.435.100.000	11.144.982.202	97,46	407 Rekomendasi	390 Rekomendasi			95,82	
	1755.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP		3.401.304.000	3.372.970.658	99,17	144 Rekomendasi	135 Rekomendasi			93,75	
		051 A Audit Kinerja Satker Pusat lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP		474.408.000	467.639.958							
		B Audit Kinerja Satker di Daerah		2.926.896.000	2.916.915.523							
	1755.011	Rekomendasi Hasil Pengawalan SPIP lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP		2.767.266.000	2.738.928.132	98,98	144 Rekomendasi	120 Rekomendasi			83	
	1755.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP serta Reviu SAKIP Kementerian		210.810.000	167.002.655	79,22	11 Rekomendasi	13 Rekomendasi			118	
		051 A Reviu terhadap SAKIP Kementerian		116.310.000	111.712.800							
		B Evaluasi terhadap SAKIP Eselon I		94.500.000	55.680.000							
	1755.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP serta LK Kementerian		882.328.000	819.562.771	92,89	49 Rekomendasi	63 Rekomendasi			129	
		051 A Reviu LK Kementerian		346.348.000	315.700.100							
		B Pelaksanaan Reviu LK Eselon I		95.400.000	79.605.501							
		C Pelaksanaan Reviu RKAKL Eselon I		440.580.000	425.879.349							
	1755.965	Layanan Audit Internal		4.173.392.000	4.046.517.986	96,96	59 Laporan	59 Laporan			100	
	002	Pengawasan Lainnya Lingkup Inspektorat I		1.876.073.000	1.793.966.172							
	051	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Lingkup Inspektorat I		1.876.073.000	1.793.966.172							
		B Menghadiri Undangan		250.825.000	248.207.972							
		C Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)		78.780.000	78.110.000							
		D Penyusunan LAKIN		10.700.000	10.600.000							
		E Asessor PMPRB		4.200.000	-							
		F Penyusunan Program/Kegiatan dan Laporan Lingkup Inspektorat I		845.647.000	819.811.400							
		G Penyelenggaraan SPIP lingkup Inspektorat I		153.480.000	141.735.000							
		I Penyelenggaraan dan Monev e-Reviu RKA-KL		532.441.000	495.501.800							
	003	Pendampingan Workshop Penyusunan LK Eselon I		474.606.000	474.605.700							
	004	Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Swasembada Pangan (UPSUS) Inspektorat I		1.729.713.000	1.717.277.976							
	051	Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingandalam rangka swasembada pangan (UPSUS) Inspektorat I		1.729.713.000	1.717.277.976							
		A Pendampingan Upsus Pajale		1.590.856.000	1.578.421.776							
		B Evaluasi/Pengawasan/Pendampingan Produksi Cabai dan Bawang Merah		138.857.000	138.856.200							
	005	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan PBJ		93.000.000	91.270.000							
II	1756	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		10.972.300.000	10.602.739.088	96,63	389 Rekomendasi	421 Rekomendasi			108,23	
	1756.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP		3.375.804.000	3.337.408.875	98,86	130 Rekomendasi	150 Rekomendasi			115,38	
		051 A Audit Kinerja Satker Pusat lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP		448.908.000	445.999.000							
		B Audit Kinerja Satker di Daerah		2.926.896.000	2.902.800.040							
	1756.011	Rekomendasi Hasil Pengawalan SPIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP		2.767.266.000	2.734.252.389	98,81	144 Rekomendasi	151 Rekomendasi			104,86	
	1756.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP		69.000.000	58.650.000	85,00	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi			100,00	
	1756.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen TP dan Ditjen		368.570.000	351.837.133	95,46	30 Rekomendasi	35 Rekomendasi			116,67	
		051 A Pelaksanaan Reviu LK Eselon I		69.600.000	67.168.300							
		B Pelaksanaan Reviu RKAKL Eselon I		298.970.000	287.688.533							
	1756.965	Layanan Audit Internal		4.391.660.000	4.120.590.691	93,83	79 Laporan	79 Laporan			100,00	
	002	Evaluasi Strategis pada satker lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP		962.619.000	919.572.519							
	003	Pengawasan Lainnya Lingkup Inspektorat II		1.621.662.000	1.491.252.164							
		A Pendampingan dan Monitoring dalam Rangka Mendukung Gerakan WTP		852.140.000	850.214.864							
		B Menghadiri Undangan		131.460.000	125.439.800							
		C Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)		86.400.000	68.758.000							
		D Penyusunan LAKIN dan Laporan Tahunan		27.560.000	15.030.000							
		E Penyusunan Program/Kegiatan dan Laporan Lingkup Inspektorat II		291.810.000	289.435.000							
		F Penyelenggaraan SPIP di lingkup Inspektorat II		22.900.000	16.440.000							
		H Penyelenggaraan dan Monev e-Evaluasi		189.742.000	111.414.500							
		I Reviu/Telaah Pedoman/Peraturan lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP		19.650.000	14.520.000							
	004	Pendampingan Workshop Penyusunan LK Eselon I		422.120.000	422.007.570							
	005	Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Swasembada Pangan (UPSUS) Inspektorat II		1.385.259.000	1.302.753.761							

III	1757	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP	10.195.600.000	9.875.502.165	96,86	450 Rekomendasi	457 Rekomendasi	101,56	
	1757.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang dan BKP	3.401.304.000	3.364.456.028	98,92	141 Rekomendasi	139 Rekomendasi	98,58	
		051 A Audit Kinerja Satker Pusat lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang, BKP	474.408.000	458.488.800					
		B Audit Kinerja Satker di Daerah	2.926.896.000	2.922.358.009					
	1757.011	Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang,	2.767.266.000	2.754.150.793	99,53	144 Rekomendasi	145 Rekomendasi	100,69	
	1757.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang, BKP	94.500.000	78.521.600	83,09	9 Rekomendasi	12 Rekomendasi	133,33	
	1757.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang, BKP	535.980.000	442.789.901	82,61	45 Rekomendasi	50 Rekomendasi	111,11	
		051 A Pelaksanaan Reviu LK Eselon I	95.400.000	70.500.000					
		B Pelaksanaan Reviu RKAKL Eselon I	440.580.000	376.469.350					
	1757.965	Layanan Audit Internal	3.396.550.000	3.235.583.843	95,26	111 Laporan	111 Laporan	100,00	
		002 Evaluasi Strategis pada satker lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang dan	581.650.000	579.983.200					
		003 Pengawasan Lainnya Lingkup Inspektorat III	1.300.536.000	1.184.609.988					
		A Reviu/Penelaahan/Kajian/Peraturan/Pedoman/Ketentuan Lainnya	25.200.000	15.540.000					
		B Menghadiri Undangan	274.208.000	265.924.632					
		C Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	69.120.000	57.430.000					
		D Penyusunan LAKIN dan Laporan Tahunan	27.560.000	14.205.000					
		E Penyusunan Program/Kegiatan dan Laporan Lingkup Inspektorat III	300.650.000	260.449.556					
		F Penyelenggaraan SPIP lingkup Inspektorat I	178.598.000	169.412.000					
		G Penyelenggaraan dan Move e-Audit	425.200.000	401.648.800					
		004 Pendampingan Workshop Penyusunan LK Eselon I	857.182.000	850.671.000					
		005 Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Swasembada Pangan (UPSUS) Inspektorat III	657.182.000	631.527.500					
IV	1758	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	10.135.800.000	9.811.646.679	96,80	444 Rekomendasi	444 Rekomendasi	100,00	
	1758.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Itjen, Ditjen PKH dan	3.494.928.000	3.371.317.890	96,46	153 Rekomendasi	153 Rekomendasi	100,00	
		051 A Audit Kinerja Satker Pusat lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	568.032.000	493.602.700					
		B Audit Kinerja Satker di Daerah	2.926.896.000	2.903.111.483					
	1758.011	Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	2.767.266.000	2.736.681.546	98,89	144 Rekomendasi	144 Rekomendasi	100,00	
	1758.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Ditjen PKH, Barantan	76.500.000	61.740.000	80,71	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	100,00	
	1758.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKA-KL lingkup Itjen, Ditjen PKH dan	502.230.000	490.874.840	97,74	45 Rekomendasi	45 Rekomendasi	100,00	
		051 A Pelaksanaan Reviu LK Eselon I	77.400.000	73.051.900					
		B Pelaksanaan Reviu RKAKL Eselon I	424.830.000	423.711.837					
	1758.965	Layanan Audit Internal	3.294.876.000	3.151.032.403	95,63	93 Laporan	93 Laporan	100,00	
		002 Evaluasi Strategis pada satker lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	432.766.000	413.847.600					
		003 Pengawasan Lainnya Lingkup Inspektorat IV	1.478.465.000	1.436.846.165					
		A Telaah Sejawat	25.650.000	26.085.000					
		B Menghadiri Undangan	167.160.000	161.683.900					
		C Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	50.640.000	50.430.000					
		E Penyusunan Program/Kegiatan dan Laporan Lingkup Inspektorat IV	592.717.000	580.150.765					
		F Penyelenggaraan SPIP lingkup Inspektorat IV	259.050.000	242.652.500					
		G Penyelenggaraan dan Move e-Audit	339.988.000	334.054.000					
		H Reviu/Penelaahan/Kajian/Peraturan/Pedoman/Ketentuan Lainnya	43.260.000	41.790.000					
		004 Pendampingan Workshop Penyusunan LK Eselon I	462.207.000	462.146.672					
		005 Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Swasembada Pangan (UPSUS) dan SIWAB Inspektorat IV	921.438.000	864.277.000					

V	1759	Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada satker lingkup Kementerian Pertanian	11.044.800.000	10.172.876.998	92,11	330 Rekomendasi	205 Rekomendasi	62,12	
	1759.010	Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu	5.271.646.000	4.736.439.297	89,85				
		S01 Audit Investigasi	680.350.000	535.211.600	78,67	21 Rekomendasi	13 Rekomendasi		
		S02 Audit Tujuan Tertentu	4.591.296.000	4.224.584.751	92,01	192 Rekomendasi	75 Rekomendasi		
	1759.965	Layanan Audit Internal	5.773.154.000	5.436.437.701	94,17	117 Laporan	117 Laporan		
	002	Pelaksanaan Pembinaan/Penilaian (assessment) Maturitas SPIP	1.590.990.000	1.521.853.950					
		A Penilaian SPIP	479.740.000	474.356.800					
		B Pembinaan SPIP	206.495.000	195.004.600					
		C Forum SPIP	821.195.000	772.762.550					
		D Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPI Secara Online	18.350.000	15.050.000					
		E Persiapan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPI Secara Online	65.210.000	64.680.000					
	003	Pembinaan/penilaian mandiri (self assessment) pembangunan ZI WBK/WBBM	3.343.944.000	3.200.382.934	95,71				
		A Pembinaan Anti Korupsi	1.734.820.000	1.647.742.181	94,98				
		B Penilaian WBK/WBBM	1.436.774.000	1.404.348.253	97,74				
		D Pemasyarakatan Anti Korupsi	172.350.000	148.292.500	86,04				
	004	Pengawasan lainnya lingkup Inspektorat Investigasi	838.220.000	751.436.011	89,65				
		A Menghadiri Undangan	116.385.000	80.341.851	69,03				
		B Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	64.500.000	64.418.560	99,87				
		C Fasilitas Lapangan	52.166.000	32.904.600	63,08				
		D Penyelenggaraan dan Monev e-Tujuan Tertentu	163.744.000	147.764.000					
		E Penyusunan Program/Kegiatan/LHP Ir Invest	441.425.000	426.007.000					
VI	1760	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	43.350.400.000	40.264.655.445	92,88	36	36	100,00	
	1760.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	13.122.710.000	12.164.817.668	92,70	12 Layanan	12 Layanan		
	051	Penyusunan Rencana Program	2.296.324.000	2.288.140.400	99,64				
		A Penyusunan PKAT	68.400.000	62.795.000					
		B Inventarisasi Data Satker dalam rangka Validasi PBJ dan Survei IACM	2.227.924.000	2.225.345.400					
	052	Penyusunan Rencana Anggaran	404.764.000	362.757.600	89,62				
		A Penyusunan SBK Itjen	51.280.000	45.030.000					
		B Penyusunan RKA-KL	124.040.000	114.155.000					
		C Penyusunan RKT Itjen	21.650.000	-					
		D Temu Koordinasi Perencanaan	173.894.000	171.697.600					
		E Penyusunan PPA, POK dan ROK Itjen	33.900.000	31.875.000					
	053	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	3.384.768.000	3.065.273.189	90,56				
		A Penyusunan Laporan Semester II 2018 dan Laporan Semester I 2019	29.275.000	27.945.000					
		B Penyusunan Laporan Tahunan Itjen	10.815.000	9.950.000					
		C Penyusunan Laporan AKIP Itjen (LAKIN)	28.190.000	15.730.000					
		D Penyusunan Laporan Tahunan APIP	21.650.000	7.200.000					
		E Pengawasan, Pengawasan, Monitoring dan Koordinasi UPSUS Pajale	2.767.613.000	2.579.199.917					
		F Penyusunan Laporan IACM Itjen	99.500.000	89.490.000	89,94				
		G Pelaksanaan Evaluasi Atase Pertanian	382.500.000	292.883.272					
		H Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penganggaran (PMK 249)	21.305.000	20.275.000					
		I Pemantauan Pelaksanaan e-SAKIP lingkup Itjen	23.920.000	22.600.000					

		054 Pengelolaan Data dan Pemantauan LHP	1.601.688.000	1.508.855.301	94,20				
		A Pelaksanaan Analisis LHP	57.640.000	57.625.000					
		B Monitoring Tindaklanjuti Hasil Pengawasan	157.630.000	154.525.000					
		C Pemutakhiran Data LHP BPK/BPKP	77.700.000	51.395.000					
		D Pemutakhiran Data LHP Itjen	51.800.000	37.160.000					
		E Penyusunan Peta Rawan Penyimpangan dan KN	55.040.000	38.185.000					
		F Temu Koordinasi Tindaklanjuti Hasil Pengawasan	151.800.000	138.541.400					
		G Pelaksanaan Survei Pemanfaatan Rekomendasi	1.050.078.000	1.031.423.901					
		055 Pengelolaan Keuangan dan TU	979.985.000	949.756.200	96,92				
		A Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan	532.700.000	521.811.000					
		B Penyusunan Daftar Gaji Induk	60.950.000	60.190.000					
		C Pemberkasan dan Penataan Arsip/Dokumen	84.000.000	79.050.000					
		D Penyusunan Tunjangan Kinerja dan Uang Makan	60.960.000	59.590.000					
		E Penyusunan Dosir dan Pajak	20.320.000	14.995.000					
		F Verifikasi dan Klasifikasi Arsip LHA	33.600.000	33.150.000					
		G Monitoring, Pemeliharaan dan Perawatan Arsip	50.400.000	50.335.000					
		H Penilaian dan Penyusutan Arsip (Pemindahan dan Pemusnahan)	67.200.000	61.850.000					
		I Manajemen Kearsipan	69.855.000	68.785.200					
		058 Pelayanan Pengelolaan Organisasi dan Kepegawaian	1.469.096.000	1.326.246.617	90,28				
		A Pelaksanaan Seminar Bidang Pengawasan	102.535.000	52.445.000					
		C Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	172.800.000	172.745.000					
		D Penyiapan Bahan Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur dan Pelayanan Publik	16.800.000	16.650.000					
		E Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit	41.755.000	35.225.000					
		F Penyusunan Rencana Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Penjenjangan	1.010.756.000	935.096.217					
		G Pembinaan Mental dan Jasmani PNS	124.450.000	114.085.400					
		059 Pelayanan Perlengkapan dan RT	1.969.420.000	1.865.397.850	94,72				
		A Honor Pengelolaan SAK	25.200.000	25.194.000					
		B Penyusunan SIMAK-BMN	77.700.000	75.835.000					
		C Inventarisasi BMN Itjen	1.110.022.000	1.079.861.650					
		D Penghapusan BMN Itjen	43.435.000	42.910.000					
		E Dokumen KIB dan DBR BMN/Penilaian BMN	61.140.000	60.437.000					
		F Pelaksanaan Rapat Kerja lingkup Itjen	311.555.000	278.417.000					
		G Temu Koordinasi Keuangan dan Perlengkapan	229.403.000	218.553.200					
		H Penyusunan Laporan Keuangan (LK)	25.500.000	8.265.000					
		K Persiapan Pemeriksaan BPK	20.450.000	15.970.000					
		L Pelaksanaan PSP BMN	20.450.000	18.900.000					
		M Pelaksanaan Wasdal BMN	7.685.000	7.385.000					
		N Evaluasi Pengadaan B/J	16.300.000	16.040.000					
		O Evaluasi Pelayanan Perkantoran	20.580.000	17.630.000					
		061 Pelayanan Humas dan Protokol	881.685.000	816.977.609	92,66				
		A Penilaian Karya Tulis Ilmiah (KTI)	37.625.000	23.900.000					
		B Penyusunan dan Pembuatan Layout Media Auditor	175.100.000	169.665.000					
		C Pelaksanaan Evaluasi LAPOR!	22.390.000	12.515.000					
		D Penyusunan Desain dan Artikel Website	51.650.000	40.695.000					
		E Penyelenggaraan Temu Koordinasi Kehumasan Eselon I	61.725.000	43.735.000					
		F Temu Koordinasi OKHH	399.170.000	394.347.609					
		G Penyelenggaraan PPID	80.910.000	79.935.000					
		H Penyelenggaraan Peraturan Perundang-undangan	41.865.000	40.935.000					
		I Keikutsertaan pada Pameran Hari Pangan Sedunia	11.250.000	11.250.000					
		062 Pelayanan Pengelolaan RB	134.980.000	77.245.000	57,23				
		A Satlak PI lingkup Sekretariat	48.500.000	-					
		B Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	86.480.000	77.245.000					
	1760.951	Layanan Internal	2.850.890.000	2.813.807.591	98,70	12 Layanan	12 Layanan		
		051 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	1.433.190.000	1.423.448.200					
		A Alat Pengolah Data dan Informasi	348.120.000	344.849.500					
		B Pengadaan Aplikasi Elektronik	1.085.070.000	1.078.598.700					
		052 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	880.680.000	857.208.391					
		053 Pengadaan Kendaraan Bermotor	52.420.000	52.170.000					
		054 Pembangunan Gedung dan Renovasi Gedung dan Bangunan	484.600.000	480.981.000					
	1760.994	Layanan Perkantoran	27.376.800.000	25.286.030.186	92,36	12 Bulan	12 Bulan		
		001 Gaji dan Tunjangan	23.727.000.000	21.832.841.523					
		002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.649.800.000	3.467.046.861					
		J U M L A H	97.134.000.000	91.872.402.577	94,58			94,99	

**Lampiran 3. Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi Lingkup
Kementerian Pertanian Tahun 2018**

NO	NAMA UNIT KERJA	WBK
I. TINGKAT UNIT ESELON I		
1	SEKRETARIAT JENDERAL	LULUS
2	INSPEKTORAT JENDERAL	LULUS
3	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	LULUS
4	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	LULUS
5	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	LULUS
6	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	LULUS
7	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	LULUS
8	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	LULUS
9	BADAN KETAHANAN PANGAN	LULUS
10	BADAN KARANTINA PERTANIAN	LULUS
11	BADAN LITBANG PERTANIAN JAKARTA	LULUS
II. TINGKAT UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)		
1	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR	LULUS
2	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK	LULUS
3	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA	LULUS
4	BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN BEKASI	LULUS
5	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM	LULUS
6	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR	LULUS
7	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	LULUS
8	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN	LULUS
9	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PALEMBANG	LULUS
10	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BATAM	LULUS
11	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PONTIANAK	LULUS
12	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II CILEGON	LULUS
13	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II JOGYAKARTA	LULUS
14	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNG PINANG	LULUS
15	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II KENDARI	LULUS
16	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE	LULUS
17	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II GORONTALO	LULUS
18	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II MEDAN	LULUS
19	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDUNG	LULUS

20	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II BANGKALAN	LULUS
21	BALAI BESAR VETERINER DENPASAR	LULUS
22	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	LULUS
23	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR	LULUS
24	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	LULUS
25	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI	LULUS
26	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN LEMBANG	LULUS
27	BALAI BESAR VETERINER WATES	LULUS
28	PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA	LULUS
29	BALAI VETERINER LAMPUNG	LULUS
30	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN BEKASI	LULUS
31	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA	LULUS
32	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN, MALANG	LULUS
33	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA-MAGELANG	LULUS
34	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU	LULUS
35	BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	LULUS
36	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	LULUS
37	BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BOGOR	LULUS
38	BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI MALANG	LULUS
39	BALAI PENELITIAN TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA TLEKUNG	LULUS
40	BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI BOGOR	LULUS
41	BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS SERAT MALANG	LULUS
42	BALAI PENELITIAN TANAMAN SEREALIA MAROS	LULUS
43	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULTRA	LULUS
44	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI	LULUS
45	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU	LULUS
46	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN YOGYAKARTA	LULUS
47	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN LAMPUNG	LULUS
48	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JABAR	LULUS
49	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN GORONTALO	LULUS
50	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT	LULUS

Sumber data: Inspektorat Investigasi, 2018

Lampiran 4. Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2018

Uraian Pengadaan	Qty	Pagu		Pemilihan	Penyedia	Kontrak					Sisa	Keterangan
		Satuan	Jumlah	Penyedia		No. Kontrak	Tgl. Mulai	Tgl. Akhir	Satuan	Jumlah	Pagu	
I. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi												
1. Pengadaan PC	30 unit	9.800.000	294.000.000	E-Purchasing	PT. Astragraphia	01/PPK-Itjen/016/IV/2018	25-Apr-18	24-Mei-18	9.800.000	294.000.000	-	Pembayaran
2. Printer	10 unit	1.526.000	15.260.000	E-Purchasing					1.526.000	15.260.000	-	Selesai
3. Notebook dan Ms.Office	1 unit	30.000.000	30.000.000	E-Purchasing	PT. Astragraphia				27.800.000	27.800.000	2.200.000	Pembayaran
4. Screen Projector	1 unit	2.000.000	2.000.000	E-Purchasing					1.391.500	1.391.500	608.500	Selesai
5. Projector	1 unit	2.800.000	2.800.000	Pengadaan Langsung	CV. Sinar Buana	244	14-Des-18	14-Des-18	2.329.000	2.329.000	471.000	Pembayaran
6. Switcher VGA	1 unit	2.500.000	2.500.000	Pengadaan Langsung					2.509.000	2.509.000	(9.000)	Selesai
Total I	44 unit		346.560.000							343.289.500	3.270.500	
II. Pengadaan Aplikasi Elektronik												
1. Aplikasi E-Review RKA-K/L	1 paket	154.250.000	154.250.000	Pengadaan Langsung	PT. Expresa P.M.	01/PPK-Itjen/029/X/2018	04-Okt-18	12-Des-18	154.247.500	154.247.500	2.500	Pembayaran
2. Aplikasi E-Review Laporan Keuangan	1 paket	163.100.000	163.100.000	Pengadaan Langsung	PT. Wira Net Solusi	01/PPK-Itjen/028/X/2018	04-Okt-18	12-Des-18	163.000.200	163.000.200	99.800	Pembayaran
3. Aplikasi E-Audit	1 paket	189.000.000	189.000.000	Pengadaan Langsung	PT. Tanah Air Bagus	01/PPK-Itjen/024/VII/2018	09-Jul-18	05-Des-18	188.760.000	188.760.000	240.000	Selesai
4. Aplikasi E-Evaluasi	1 paket	176.770.000	176.770.000	Pengadaan Langsung	PT. Mediantara Kreasi	01/PPK-Itjen/027/IX/2018	25-Sep-18	13-Des-18	176.550.000	176.550.000	220.000	Pembayaran
5. Aplikasi E-Pengawasan	1 paket	169.600.000	169.600.000	Pengadaan Langsung	PT. Cakra Lentera Utama	01/PPK-Itjen/026/IX/2018	12-Sep-18	10-Des-18	169.565.000	169.565.000	35.000	Selesai
6. Aplikasi E-Tujuan Tertentu	1 paket	168.500.000	168.500.000	Pengadaan Langsung	PT. Aplindo	01/PPK-Itjen/022/VII/2018	11-Jul-18	08-Okt-18	168.476.000	168.476.000	24.000	Pembayaran
7. Aplikasi Gratifikasi Online	1 paket	50.000.000	50.000.000	Pengadaan Langsung	PT. Talent Smart	01/PPK-Itjen/037/X/2018	29-Okt-18	07-Des-18	48.000.000	48.000.000	2.000.000	Selesai
8. Aplikasi E-Sipolis	1 paket	10.000.000	10.000.000	Pengadaan Langsung	CV. Ground Leuser		01-Nov-18	01-Nov-18	10.000.000	10.000.000	-	Pembayaran
Total II	6 paket		1.081.220.000							1.078.598.700	2.621.300	

III. Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor													
1. Filling Cabinet	10 unit	3.200.000	32.000.000	E-Purchasing	PT. Datascrip	01/PPK-Itjen/002/II/2018	21-Feb-18	22-Mar-18	3.194.400	31.944.000	56.000	Pembayaran	
2. Lemari Besi	10 unit	3.625.000	36.250.000	E-Purchasing					3.620.320	36.203.200	46.800	Selesai	
3. Rak Besi	12 unit	2.730.000	32.760.000	Pengadaan Langsung	CV. Putra Amiras		12-Mar-18		2.730.000	32.760.000	-	Pembayaran	
4. Laser Meter	6 unit	2.000.000	12.000.000	E-Purchasing	PT. Perkakasku				1.811.480	10.868.880	1.131.120	Selesai	
5. Lemari Wardrobe	1 unit	11.600.000	11.600.000	Pengadaan Langsung					11.600.000	11.600.000	-	Pembayaran	
6. Lemari Low Filling Kabinet	1 unit	4.299.000	4.299.000	Pengadaan Langsung					4.299.000	4.299.000	-	Pembayaran	
7. Kipas Angin	1 unit	2.000.000	2.000.000	Pengadaan Langsung	CV. Sinar Buana		03-Dec-18	03-Dec-18	2.000.000	1.960.000	40.000	Perkiraan	
8. UPS	1 unit	1.500.000	1.500.000	Pengadaan Langsung					1.500.000	1.500.000	-	Realisasi	
9. Screen Projector	1 unit	1.800.000	1.800.000	Pengadaan Langsung	CV. Putra Amiras		24-Sep-18	24-Sep-18	1.793.000	1.793.000	7.000	Pembayaran	
10. Mesin Foto Copy	2 unit	100.600.000	201.200.000	E-Purchasing	PT. Access Lintas	01/PPK-Itjen/036/XI/2018	30-Nov-18	13-Dec-18	95.071.110	190.142.220	11.057.780	Selesai	
11. TV	5 unit	6.500.000	32.500.000	E-Purchasing					5.933.400	29.667.000	2.833.000	Pembayaran	
12. Voter	1 paket	50.000.000	50.000.000	Pengadaan Langsung	PT. Cakrawala		30-Nov-18	30-Nov-18	49.500.000	49.500.000	500.000	Selesai	
Total III	51 unit		417.909.000							402.237.300	15.671.700	Proses Bayar	
IV. Pengadaan Prasarana dan Sarana Gedung													
1. Kursi Rapat	55 unit	581.000	31.955.000	E-Purchasing	PT. Mandegani		21-Feb-18	21-Feb-18	581.000	31.955.000	-	Pembayaran	
2. Meja Ruang Rapat Lantai 4	12 unit	3.500.000	42.000.000	E-Purchasing	PT. Deka Sari P.		21-Feb-18	21-Feb-18	3.500.000	42.000.000	-	Selesai	
3. Meja Kerja	30 unit	3.806.000	114.180.000	Pengadaan Langsung	CV. Tiga Putra Jaya	01/PPK-Itjen/006/III/2018	16-Mar-18	09-Apr-18	3.806.000	114.180.000	-	Pembayaran	
4. Delegate Conference Chairman	1 unit	4.240.000	4.240.000	E-Purchasing	PT. Mitsindo	01/PPK-Itjen/031/X/2018	31-Okt-18	29-Nov-18	5.230.000	5.230.000	(990.000)	Pembayaran	
5. Delegate Conference	11 unit	4.240.000	46.640.000	E-Purchasing					4.150.000	45.650.000	990.000		Selesai
6. Delegate Conference Control Unit	1 unit	23.000.000	19.720.000	E-Purchasing					19.530.000	19.530.000	190.000		
7. Accesspoint	10 unit	7.310.000	73.100.000	E-Purchasing	PT. Bhinneka	01/PPK-Itjen/014/IV/2018	25-Apr-18	24-Mei-18	7.309.300	73.093.000	7.000	Pembayaran	
8. Power Injector Accesspoint	10 unit	1.150.000	11.500.000	E-Purchasing					1.150.000	11.500.000	-	Selesai	
9. AC Split 2 PK	3 unit	7.000.000	21.000.000	Pengadaan Langsung	CV. Putra Amiras		21-Sep-18	21-Sep-18	6.743.000	20.229.000	771.000	Pembayaran	
10. Instalasi ACR R. Ses Itjen	1 pkt	1.850.000	1.850.000	Pengadaan Langsung					1.617.000	1.617.000	233.000		Selesai
11. Instalasi ACR R. Irjen	1 pkt	4.050.000	4.050.000	Pengadaan Langsung					3.641.000	3.641.000	409.000		
12. Karpet R. Tamu Irjen	51 m2	520.000	26.327.600	Pengadaan Langsung	CV. Tiga Putra Jaya		26-Sep-18	26-Sep-18	510.620	25.852.691	474.909	Pembayaran	
13. Karpet Rumput Sintetis	12 m2	365.000	4.380.000	Pengadaan Langsung					356.950	4.283.400	96.600	Selesai	
14. Meja Kursi Taman	1 set	4.000.000	4.000.000	Pengadaan Langsung	CV. Sinar Buana		04-Dec-18	04-Dec-18	3.900.000	3.900.000	100.000	Pembayaran	
15. Kursi Es.III dan Es.IV	14 unit	2.500.000	35.000.000	Pengadaan Langsung	CV. Tujuh Samudra	013/KW-TS/XII.2018	14-Dec-18	14-Dec-18	2.200.000	30.800.000	4.200.000	Pembayaran	
16. Kursi Pimpinan (Mimbar)	4 unit	2.800.000	11.200.000	Pengadaan Langsung					2.600.000	10.400.000	800.000	Selesai	
17. Kabel Extention Delegate system 20m	1 lot	5.599.000	5.599.000	Pengadaan Langsung	PT. Mitsindo	INV-MVP/V/18/12/329	04-Dec-18	04-Dec-18	5.215.000	5.215.000	384.000	Pembayaran	
18. Kabel Extention Delegate system 3m	3 lot	1.350.000	4.050.000	Pengadaan Langsung					1.295.000	3.885.000	165.000	Selesai	
Total IV	221 unit		460.791.600							452.961.091	7.830.509		

V. Pengadaan Kendaraan Bermotor													
													Pembayaran
1. Sepeda Motor	2 unit	26.000.000	52.000.000	E-Purchasing	PT. Putera	01/PPK-Itjen/035/XI/2018	30-Nov-18	13-Dec-18	25.875.000	51.750.000	250.000	Selesai	
Total V	2 unit		52.000.000							51.750.000	250.000		
VI. Pembangunan Gedung dan Renovasi Gedung Bangunan													
													Pembayaran
1. Renovasi Ruang Kerja Ir. Investigasi	1 paket	66.095.000	66.095.000	Pengadaan Langsung	CV. Pulma Indah	01/PPK-Itjen/033/XI/2018	23-Nov-18	13-Dec-18	63.993.000	63.993.000	2.102.000	Selesai	
													Pembayaran
2. Ruang Audio Visual dan Editing	1 paket	83.905.000	83.905.000	Pengadaan Langsung	PT. Bentara	01/PPK-Itjen/034/XI/2018	23-Nov-18	13-Dec-18	82.800.000	82.800.000	1.105.000	Selesai	
													Pembayaran
2. Rehab Ruang Kerja Irijen	1 paket	195.000.000	195.000.000	Pengadaan Langsung	CV. Pulma Indah	01/PPK-Itjen/004/II/2018	23-Feb-18	03-Apr-18	193.919.000	193.919.000	1.081.000	Selesai	
													Pembayaran
3. Rehab Ruang Kerja Sekretaris Irijen	1 paket	194.000.000	194.000.000	Pengadaan Langsung	CV. Tuah Mas	01/PPK-Itjen/018/IV/2018	02-Mei-18	31-Mei-18	138.169.000	138.169.000	55.831.000	Selesai	
Total VI	4 paket		539.000.000							478.881.000	60.119.000		

Sumber Data: dari Bagian Keuangan & Perlangkapan